

**PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN DAERAH
PROVINSI MALUKU**

Triwulan III - 2006

**Kantor Bank Indonesia
Ambon**

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil

Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang Negara Indonesia yang berkesinambungan

Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia

Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan

Kami sangat mengharapkan komentar, saran dan kritik demi perbaikan buku ini.

Alamat Redaksi :

Seksi Statistik dan Kajian Ekonomi Moneter (SKEM)

Kantor Bank Indonesia Ambon

Jl. Pattimura No. 7

AMBON, 97124

Telp. : 0911-352762-63 ext. 1039

Fax. : 0911-356517

E-Mail : edy_kristianto@bi.go.id

Homepage : www.bi.go.id

KATA PENGANTAR

Buku Perkembangan Perekonomian Daerah Provinsi Maluku, yang disusun secara rutin triwulanan merupakan salah satu Program Kerja Kantor Bank Indonesia Ambon. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk (i) memberikan masukan bagi perumusan kebijakan di kantor pusat, dan (ii) memberikan masukan mengenai perkembangan moneter, perbankan dan sistem pembayaran regional di Propinsi Maluku kepada pihak terkait (*stakeholder*) di daerah secara rutin setiap triwulan.

Buku ini menyajikan perkembangan ekonomi regional khususnya perkembangan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Perkembangan tersebut disajikan dalam bentuk yang ringkas dan diusahakan menggunakan data terkini yang dapat diperoleh. Penambahan kajian yang lebih mendalam pada sumber pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi semoga dapat dimanfaatkan berbagai pihak dalam mengambil kebijakan.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari seluruh perbankan, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Badan Pusat Statistik, responden survei, Universitas Pattimura dan berbagai pihak terutama masyarakat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Ambon. Selain itu pula kami juga menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna lebih meningkatkan kualitas hasil survei agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak dan semoga Tuhan memberikan berkah-Nya kepada kita semua dalam mengupayakan kinerja yang lebih baik.

Ambon, Oktober 2006
BANK INDONESIA AMBON
ttd

Rizal Husein
Pemimpin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
Box 1. Survei Masalah Rendahnya Realisasi DIPA 2006 dan Upaya Percepatannya di Provinsi Maluku	9
BAB I. PERKEMBANGAN MONETER DAN PEREKONOMIAN REGIONAL	11
1.1. Kondisi Umum	12
1.2. Perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Maluku	12
1.2.1. Permintaan Daerah	14
1.2.2. Penawaran Daerah	17
1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kotamadya	20
1.3. Pertumbuhan Inflasi	23
1.3.1. Kelompok Bahan Makanan	27
1.3.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	29
1.3.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	30
1.3.4. Kelompok Sandang	32
1.3.5. Kelompok Kesehatan	33
1.3.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	34
1.3.7. Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan	35
Box 2. Kebijakan Baru Mendorong Intermediasi dan Konsolidasi Perbankan	37

BAB II. PERKEMBANGAN PERBANKAN REGIONAL	39
2.1. Perkembangan Kinerja Perbankan	40
2.2. Asset Perbankan Maluku	42
2.3. Penghimpunan Dana Masyarakat	42
2.4. Penyaluran Kredit Perbankan	45
2.4.1. Realisasi Kredit Baru Bank Umum (data LBU)	47
2.4.2. Penyaluran Kredit Bank Umum (Bank Pelapor) per Sub Sektor Ekonomi & Wilayah Bank Pelapor	48
2.4.3. Kredit Bank Umum Menurut Skala Usaha	49
2.5. Loan to Deposit Ratio (LDR)	50
2.6. Kredit Bermasalah / Non Performing Loans Bank Umum	51
Box 3. Survei Pemetaan Ekonomi Bank Indonesia	53
BAB III. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN REGIONAL	55
3.1. Perputaran Uang	56
3.1.1. Inflow (Uang Masuk)	57
3.1.2. Outflow (Uang Keluar)	57
3.1.3. PTTB (Uang Rusak/Lusuh)	57
3.2. Perputaran Kliring	58
3.3. Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement)	59
BAB IV. PROSPEK EKONOMI REGIONAL	63
4.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi	64
4.2. Prospek Inflasi	66
4.3. Prospek Perbankan dan Sistem Pembayaran	66
4.4. Faktor Risiko	67
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perkembangan PDRB Maluku Sisi Permintaan.....	15
Tabel 2.	Pertumbuhan dan Sumbangan Tahunan PDRB Maluku Sisi Permintaan	15
Tabel 3.	Pertumbuhan & Sumbangan Triwulanan PDRB Maluku Sisi Permintaan	16
Tabel 4.	PDRB Sektoral Maluku Berdasarkan Harga Konstan Th. 2000 (Miliar).....	18
Tabel 5.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Miliar)	18
Tabel 6.	Pertumbuhan dan Sumbangan Triwulanan PDRB Maluku	20
Tabel 7.	Perkembangan PDRB Maluku Menurut Daerah Kabupaten/Kotamadya	21
Tabel 8.	Pertumbuhan & Sumbangan Tahunan PDRB Maluku Menurut Daerah Kabupaten/Kotamadya	21
Tabel 9.	Pertumbuhan dan Sumbangan Triwulanan PDRB Maluku Menurut Daerah Kabupaten/Kotamadya	23
Tabel 10.	Laju Inflasi Kota Ambon Triwulan III Tahun 2006	25
Tabel 11.	Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kota Ambon Triwulan III 2006	26
Tabel 12.	Komoditi Utama Penyumbang Deflasi Kota Ambon Triwulan III 2006.....	27
Tabel 13.	Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Bahan Makanan	28
Tabel 14.	Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	29
Tabel 15.	Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	31
Tabel 16.	Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Sandang	32
Tabel 17.	Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Kesehatan	33
Tabel 18.	Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga.....	34
Tabel 19.	Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan	35
Tabel 20.	Perbandingan Kredit Lokasi Proyek dan Kredit Bank Pelapor di Provinsi Maluku Triwulan III 2006	45
Tabel 21.	Mutasi Baki Debet Kredit triwulan III 2006 berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum	48
Tabel 22.	Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Wilayah Bank Pelapor LBU	48
Tabel 23.	Kredit Bank Umum Berdasarkan Bank Pelapor Menurut Skala Usaha	49
Tabel 24.	LDR Perbankan	50
Tabel 25.	Kredit Bank Umum Berdasarkan LBU per Sub Sektor Ekonomi	52
Tabel 26.	Peta Transaksi RTGS Incoming	61
Tabel 27.	Peta Transaksi RTGS Outgoing	62

DAFTAR GRAFIK

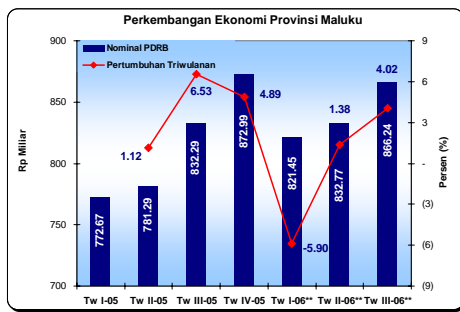
Grafik 1.	Perkembangan Ekonomi Provinsi Maluku	13
Grafik 2.	Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Provinsi Maluku	13
Grafik 3.	Perbandingan Realisasi Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan	14
Grafik 4.	Perkembangan Arus Barang Provinsi Maluku	17
Grafik 5.	Komposisi PDRB Sektoral Maluku Triwulan III Tahun 2006 Berdasarkan Harga Konstan Tahun Dasar 2000	19
Grafik 6.	Komposisi PDRB Maluku Menurut Daerah Kabupaten/Kotamadya	22
Grafik 7.	Perkembangan Laju Inflasi Kota Ambon	24
Grafik 8.	Sumbangan Inflasi Per Kelompok Triwulan III Tahun 2006	25
Grafik 9.	Perkembangan Inflasi Bahan Makanan di Kota Ambon	28
Grafik 10.	Perkembangan Inflasi Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	30
Grafik 11.	Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Kota Ambon	31
Grafik 12.	Perkembangan Inflasi Kelompok Sandang di Kota Ambon	33
Grafik 13.	Perkembangan Inflasi Kelompok Kesehatan di Kota Ambon	34
Grafik 14.	Perkembangan Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	35
Grafik 15.	Perkembangan Inflasi Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan ...	36
Grafik 16.	Perkembangan Indikator Pkok Perbankan	40
Grafik 17.	Indikator Pokok Perbankan Perwilayah	41
Grafik 18.	Perbandingan Pangsa Asset BUMN/D & BUMS	42
Grafik 19.	Perkembangan Dana Masyarakat	43
Grafik 20.	Perkembangan Pangsa DPK per Deposan	43
Grafik 21.	Komposisi DPK Menurut Lokasi Penghimpunan Dana Triwulan III Tahun 2006	44
Grafik 22.	Perkembangan DPK Menurut Lokasi Penghimpunan Dana	44
Grafik 23.	Perbandingan Kredit dari Perbankan Maluku dgn Kredit dari Perbankan di Luar Maluku Berdasarkan Jenis Penggunaan Posisi Tw. III 2006	46

Grafik 24.	Perbandingan Kredit dari Perbankan Maluku dgn Kredit dari Perbankan di Luar Maluku Berdasarkan Sektor Ekonomi Posisi Tw. III 2006	46
Grafik 25.	Perbandingan Perkembangan Kredit dari Perbankan di Maluku dan Perbankan di luar Maluku	47
Grafik 26.	LDR, Pertumbuhan DPK & Kredit	50
Grafik 27.	NPL's Bank Umum	51
Grafik 28.	Perkembangan Perputaran Uang Regional	56
Grafik 29.	Perkembangan Perputaran Kliring Regional	58
Grafik 30.	Perkembangan Rata-rata Harian Perputaran Kliring Regional	59
Grafik 31.	Perkembangan Transaksi RTGS Bank Indonesia Ambon	60
Grafik 32.	Indeks Hasil Survei Konsumen	65
Grafik 33.	Proyeksi Inflasi 2006 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha	66



RINGKASAN EKSEKUTIF

Triwulan III-2006 Maluku tumbuh secara tahunan 4,08% ...



Selama triwulan III tahun 2006, laju pertumbuhan ekonomi tahunan (y-o-y) Provinsi Maluku tercatat peningkatan namun terjadi perlambatan dibandingkan dengan selama triwulan I dan II tahun 2006. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, PDRB Provinsi Maluku mengalami peningkatan dan bahkan merupakan pertumbuhan triwulanan tertinggi ditahun 2006. PDRB Maluku (atas dasar harga konstan tahun 2000) pada triwulan laporan tumbuh 4,08% (y-o-y) dibanding selama triwulan III tahun sebelumnya. Secara triwulanan, PDRB Maluku mencatat peningkatan dibandingkan triwulan II tahun 2006 yaitu sebesar 4,02% dari Rp832,77 Miliar¹ selama triwulan II tahun 2006 naik menjadi Rp866,24 Miliar selama triwulan III tahun 2006.

Dari sisi permintaan, selama triwulan laporan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah mempunyai sumbangan yang dominan dalam pertumbuhan ekonomi Maluku. Konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan 3,29% dan konsumsi pemerintah memberikan sumbangan 1,59% terhadap total pertumbuhan ekonomi 4,08%. Kinerja ekspor juga turut memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun lebih kecil (0,87%). Tingginya dominasi sumbangan konsumsi rumah tangga dan pemerintah dikarenakan meningkatnya konsumsi masyarakat akan barang dan jasa serta telah berjalannya proyek pemerintah.

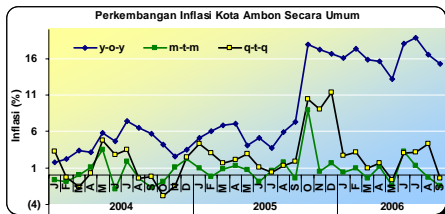
Dari sisi penawaran, pada periode laporan kontributor utama pertumbuhan ekonomi tahunan adalah Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran, kemudian diikuti Sektor

¹ merupakan hasil koreksi perhitungan pada triwulan II tahun 2006 yang tercatat sebesar Rp797,76%

Pertanian dan Sektor Angkutan & Komunikasi. Sektor yang memberikan sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan triwulan laporan (terjadi penurunan) adalah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Konstruksi/Bangunan.

Berdasarkan daerah Kabupaten/Kotamadya, pada periode laporan kontributor utama pertumbuhan ekonomi Maluku adalah masih tetap Kota Ambon yang sekaligus ibukota provinsi. Satu-satunya kabupaten yang masih memberikan sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan Maluku adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara triwulanan Ambon deflasi 0,48%, Selama triwulan III tahun 2006 Kota Ambon mengalami secara tahunan inflasi Ambon 15,26% inflasi triwulanan (IHK September dibanding IHK Juni)

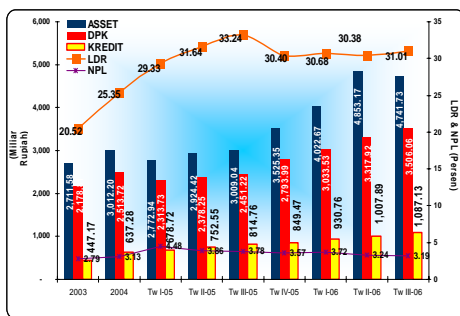


sebesar -0,48% (q-t-q) atau mengalami deflasi (penurunan harga), sedangkan laju inflasi tahunan Kota Ambon pada akhir triwulan III tahun 2006 (September 2006 terhadap September 2005) sebesar 15,26% (y-o-y). Secara umum laju inflasi Kota Ambon pasca kenaikan harga BBM mulai berangsur-angsur turun terkecuali pada awal tahun yang cukup terganggu dengan kenaikan harga beras. Dua puluh komoditi utama penyumbang inflasi (kenaikan harga) Kota Ambon selama triwulan III tahun 2006 dan besar sumbangannya berturut-turut adalah Tukang Bukan Mandor (0,72%), Beras (0,16%), Daging Ayam Ras (0,12%), Lemon Cina (0,11%), Cabe Rawit (0,10%), Pepaya (0,07%), Emas Perhiasan (0,05%), Bayam (0,05%), Pisang (0,04%), Kangkung (0,07%) dan seterusnya hingga Sabun Cuci Batangan (0,01%).

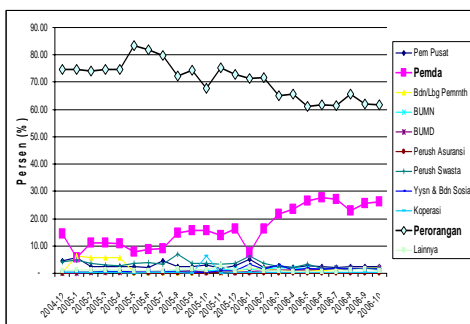
Pada triwulan III 2006, total kredit yang disalurkan perbankan di Maluku sebesar Rp. 1,09 triliun, mengalami peningkatan baik selama satu triwulan (q-t-q) yaitu

sebesar 7,86% maupun selama satu tahun (y-o-y) yaitu sebesar 33,4%. Demikian pula dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan sebesar 3,5 triliun mengalami peningkatan baik selama satu triwulan (q-t-q) sebesar 5,67% maupun selama satu tahun (y-o-y) sebesar 43,04%.

Secara tahunan Asset, DPK dan Kredit perbankan di wilayah Maluku terus meningkat



Peningkatan DPK dari pemda cukup tinggi yg menyebabkan pangsa dana pemda meningkat sedangkan dana perorangan menurun

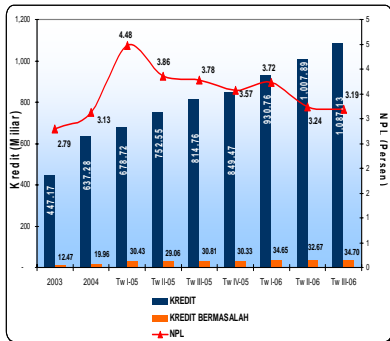


Intermediasi perbankan yang ditunjukkan perbandingan antara kredit terhadap DPK atau Loan to Deposit Ratio (LDR) dibanding triwulan sebelumnya (q-t-q) meningkat dari 30,38% menjadi 31,01%, hal ini dikarenakan pertumbuhan kredit lebih tinggi daripada DPK. Sedangkan dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-o-y) menurun dari 33,24% menjadi 31,01%, yang disebabkan pertumbuhan DPK lebih tinggi daripada kredit.

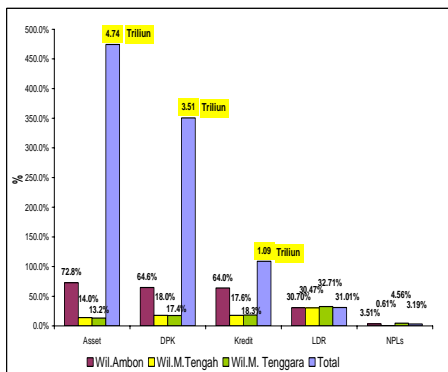
Angka LDR di Maluku berfluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh turun naiknya DPK, dan turun naiknya DPK sangat dipengaruhi oleh turun naiknya dana yang bersumber dari pemda yang umumnya berbentuk giro. Sedangkan DPK yang bersumber dari perorangan cenderung stabil dengan tren sedikit meningkat. Namun karena peningkatan DPK pemda lebih tinggi maka pangsa DPK dari perorangan menurun dari kisaran 70% menjadi sekitar 60% sedangkan dari pemda naik dari kisaran 20 menjadi sekitar 30% dari total DPK.

Asset mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya sebesar Rp. 111,23 Miliar atau tumbuh - 2,30%, namun kalau dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-o-y) masih lebih tinggi sebesar Rp. 1,7 triliun atau tumbuh 57,58%.

Ringkasan Eksekutif Perkembangan Perekonomian Daerah Provinsi Maluku Triwulan III 2006



Sekitar 60% kegiatan perbankan masih terpusat di Kota Ambon



Kredit bermasalah perbankan terus menunjukkan penurunan hingga pada triwulan laporan sebesar 3,17%. Selain karena adanya perbaikan kualitas kredit, penyelesaian kredit bermasalah, juga disebabkan adanya penambahan kredit baru yang cukup tinggi. Adapun Realisasi kredit baru selama triwulan III 2006 sebesar Rp. 156,7 Miliar, meningkat Rp. 10,1 Miliar dibanding triwulan sebelumnya.

Dilihat perwilayah, kegiatan perbankan didominasi di wilayah Ambon (Kodya Ambon) dengan jumlah persentase asset, dpk dan kredit tertinggi yaitu diatas 60% dari total di Provinsi Maluku. Sedangkan sisanya terbagi di dua wilayah lainnya yaitu wilayah maluku tengah (Malteng, Buru, SBB, SBT) dan maluku tenggara (Maltengg, MTB, Kep. Aru), dengan persentase asset, dpk dan kredit relatif seimbang di kedua wilayah tersebut.

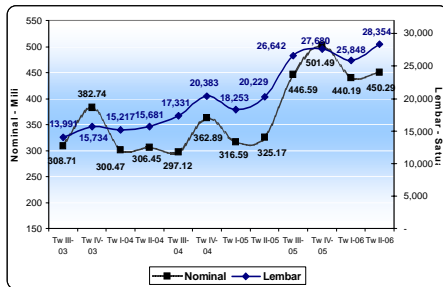
Kalau dilihat persentase antara dpk yang dihimpun dengan kredit yang disalurkan (LDR) maka tertinggi terjadi di wilayah Maluku tenggara. Namun ekspansi kredit oleh perbankan di wilayah ini diikuti oleh jumlah kredit bermasalah yang persentasenya tertinggi. Sedangkan untuk wilayah maluku tengah LDR nya terendah namun NPLs-nya juga paling rendah.

Dari total kredit sebesar Rp. 1,69 Triliun, kredit yang berasal dari perbankan di Maluku sebesar Rp. 1,09 Triliun sedangkan yang berasal dari perbankan di luar Prov. Maluku sebesar Rp 685,2 Miliar ($\pm 40\%$). Kredit dari luar tersebut berasal dari Bank Umum Milik Negara sebesar 83% yang disalurkan tertinggi ke wilayah Maluku Tengah sebesar 54%. Menurut jenis penggunaannya kredit tersebut umumnya untuk kredit produktif yaitu modal kerja (43%) dan investasi (54%) dan menurut sektornya tertinggi adalah sektor industri (61%) serta Pertanian (33%).

Keterangan	Kredit Berdiri (LDBUL BEPR *)	%	Kredit Berdiri Lokasi Proyek (Buku SEKDAY *)	%	Selisih Kredit di Perbankan di Luar Maluku	%
A. Wilayah	1.087.127	100%	1.771.878	100%	684.751	100%
1 Ambon	666.796	64%	930.074	53%	236.178	34%
2 Maluku Tengah	191.845	18%	560.401	32%	368.556	54%
3 Maluku Tenggara	199.486	18%	281.503	16%	81.017	12%
B. Kepemilikan	1.087.127	100%	1.771.878	100%	684.751	100%
1 BUMN/BUMD	919.502	89%	1.477.733	83%	558.231	83%
2 Swasta	167.625	15%	294.145	17%	126.520	17%
C. Jenis Penggunaan	1.087.127	100%	1.771.878	100%	684.751	100%
1 Modal Kerja	263.765	24%	551.515	31%	287.750	43%
2 Investasi	42.844	4%	426.350	24%	383.506	54%
3 Konsumsi	780.518	72%	794.013	45%	13.495	2%
D. Sektor Ekonomi	1.087.127	100%	1.771.878	100%	684.751	100%
1 Pertanian	7.672	1%	246.228	14%	238.556	33%
2 Perkebunan	-	0%	1.000	0%	1.000	1%
3 Industri	2.175	0%	416.012	23%	413.837	61%
4 Listrik, Gas & Air	-	0%	5	0%	5	0%
5 Konstruksi	83.265	8%	92.808	5%	9.541	1%
6 Perdagangan/Retail	182.303	17%	187.673	11%	5.370	1%
7 Pengangkutan dll	11.882	1%	12.341	1%	459	0%
8 Jasa Dunia Usaha	8.542	1%	11.614	1%	3.072	0%
9 Jasa Sosial Masyarakat	8.132	1%	8.254	0%	122	0%
10 Lain-lain	783.196	72%	796.146	45%	12.989	2%

Ket *) Kredit di Perbankan di Prov. Maluku Posisi September 2006
*) Total Kredit baik di Perbankan di maupun di luar Prov. Maluku Posisi September 2006

Aliran dana melalui proses kliring dan RTGS terus meningkat...



Indikator **sistem pembayaran** Maluku yang ditunjukkan oleh perputaran uang baik tunai maupun non tunai terus meningkat. Perputaran kliring selama Triwulan III tahun 2006 tercatat sebanyak 24.965 lembar, jumlah ini berkurang sebesar 6,29% dibanding tahun sebelumnya dimana selama Triwulan III tahun 2005 tercatat terjadi perputaran kliring sebanyak 26.642 lembar. Secara nominal, perputaran kliring di wilayah kliring Maluku selama Triwulan III tahun 2006 tercatat sebesar Rp 443,78 Miliar, berkurang sebesar 0,63% dibandingkan perputaran kliring selama Triwulan III tahun 2005 yang tercatat sebesar Rp 446,59 Miliar. Transaksi non tunai melalui RTGS yang sifatnya seketika (*real time*) cenderung mengalami peningkatan. Pada Triwulan III tahun 2006 tercatat transaksi RTGS melalui Kantor Bank Indonesia Ambon sebesar Rp 3.914 Miliar untuk *Outgoing* dan Rp 5.400 Miliar untuk *Incoming*. Jumlah outgoing tersebut secara tahunan meningkat sebesar 72,65% dibanding transaksi outgoing RTGS selama Triwulan III tahun 2005 yang tercatat sebesar Rp 2.267 Miliar. Jumlah transaksi incoming RTGS di Maluku meningkat secara tahunan sebesar 183,68% dibanding transaksi incoming RTGS selama Triwulan III tahun 2005 yang tercatat sebesar Rp 1.904 Miliar.

Pertumbuhan ekonomi periode mendatang diperkirakan lebih tinggi ...

Perekonomian Maluku pada triwulan mendatang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan bahkan lebih tinggi dibanding triwulan laporan. Membaiknya faktor cuaca/musim dan perkembangan indikator-indikator ekonomi baik pada periode laporan maupun periode-periode mendatang, diperkirakan akan menjadikan pertumbuhan ekonomi Maluku yang lebih tinggi. Kondisi tersebut didukung oleh membaiknya indikator ekonomi makro dimana nilai tukar rupiah mulai



menguat dan stabil, penurunan tingkat suku bunga serta inflasi yang rendah. Semakin kondusifnya Maluku untuk berinvestasi dan berbisnis yang ditunjukkan dengan banyak masuknya pelaku bisnis baru yang mulai mengincar pasar Maluku juga turut mendukung perkembangan ekonomi. Konsumsi pemerintah dan masyarakat yang meningkat makin memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi di periode mendatang.

Dari **sisi permintaan/pengeluaran**, diproyeksikan sumber pendorong pertumbuhan di periode mendatang adalah konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang terus memberikan kontribusi utama pertumbuhan ekonomi di Maluku. Kondisi Maluku yang masih sulit untuk menghadirkan investor besar kiranya perlu dirangsang dengan adanya keberanian investasi oleh pemerintah daerah Maluku sendiri dengan terus melanjutkan pembangunan berbagai fasilitas pendukung investasi khususnya transportasi dan komunikasi. Sedangkan dari **sisi penawaran/produksi**, sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor pertanian khususnya sub sektor perikanan akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Maluku di triwulan mendatang.

Laju inflasi mendapat tekanan, namun telah kembali pada level single digit ...

Pada periode mendatang diproyeksikan laju inflasi akan terus mengalami tekanan sejalan dengan datangnya perayaan hari raya idul fitri dan natal serta tahun baru. Meskipun demikian genap setahunnya kenaikan BBM pada bulan Oktober 2006 akan mengembalikan laju inflasi baik nasional maupun regional pada level *single digit*. Meskipun laju inflasi secara nasional diperkirakan berada pada level 8 ± 1 %, namun kalangan dunia usaha di Maluku memperkirakan laju inflasi tahun 2006 sebesar **8,80%** tepat berada di kisaran proyeksi nasional



Kinerja perbankan semakin menunjukkan peningkatan ...

(berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha) sedikit berada di atas proyeksi nasional.

Penurunan BI Rate secara nasional diharapkan secara regional dapat direspon positif baik oleh kalangan perbankan maupun dunia usaha. Akumulasi dana masyarakat yang cukup besar di perbankan khususnya yang berasal dari dana pemerintah diperkirakan akan dapat dicairkan pada triwulan mendatang. Penyaluran kredit perbankan yang terus meningkat diperkirakan juga akan terus meningkat bahkan pertumbuhan kredit perbankan akan lebih tinggi ditriwulan mendatang. Kegiatan perekonomian yang terus meningkat diperkirakan juga akan terus meramaikan transaksi pembayaran di Maluku baik melalui proses kliring maupun RTGS.

tiga faktor risiko tetap harus diwaspadai ...

Meskipun terdapat optimisme yang lebih besar terhadap perbaikan kinerja ekonomi pada saat mendatang, berbagai **risiko tetap harus diwaspadai**. Pertama, terganggunya stok produksi di daerah lain seperti Sulawesi dan Jawa akibat datangnya musim penghujan yang dapat menimbulkan dampak kurangnya barang-barang impor dari daerah tersebut seperti beras, sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Kedua, faktor musim hari raya dan permasalahan infrastruktur, khususnya prasarana transportasi perlu diantisipasi untuk mencegah kenaikan harga khususnya kelompok makanan. Ketiga, adanya berbagai kendala dalam penyaluran anggaran untuk belanja modal pemerintah dan implementasi kebijakan pemerintah dalam perbaikan iklim investasi.

Box 1

SURVEI MASALAH RENDAHNYA REALISASI DIPA 2006 DAN UPAYA PERCEPATANNYA DI PROVINSI MALUKU

Belanja pemerintah pada semester I tahun anggaran 2006, khususnya belanja barang, modal, bantuan sosial dan belanja lain-lain diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara signifikan. Namun, secara nasional tingkat penyerapan dana anggaran yang berasal dari DIPA tahun anggaran 2006 masih belum cukup memenuhi harapan. Di Provinsi Maluku realisasi anggaran yang dialokasikan melalui DIPA 2006 masih dibawah realisasi anggaran secara nasional.

Penyerahan DIPA tahun 2006 yang lebih awal disbanding tahun 2005 ternyata tidak mempunyai korelasi langsung secara linier terhadap kecepatan pelaksanaan belanja pemerintah. Untuk itu, perlu diidentifikasi faktor-faktor penghambat yang merupakan kendala terhadap penyerapan dana dimaksud melalui survey ini untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Survei ini dilakukan pada bulan Juli 2006 dengan responden para KPA/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen sebagai sample dengan cara pengambilan sample menggunakan metode *stratified sampling* pada KPPN Ambon, Masohi, Tual & Saumlaki. Responden mengisi kuesioner menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan DIPA beserta revisinya, tingkat pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya terkait dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Perdirjen Nomor 66 tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan APBN, Pelayanan KPPN maupun Pelaporan Keuangan.

Berdasarkan identifikasi masalah, kendala yang dihadapi para pengelola keuangan pada masing-masing satuan kerja dalam kenyataannya disebabkan oleh banyak faktor. Dari proses penelusuran masalah ditemukan bahwa masalah rendahnya realisasi anggaran tahun 2006 di Provinsi Maluku adalah sbb :

1. Pemahaman terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa masih rendah. Kendala yang terjadi adalah pada penetapan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa.
2. Adanya keterlambatan penerbitan Surat Keputusan penunjukkan pengelola kegiatan yang berakibat pada lambannya proses tender.
3. Banyaknya dana DIPA yang diblokir baik oleh DJAPK maupun oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang proses revisinya memerlukan waktu relatif lama sehingga kegiatan tidak dapat segera dilaksanakan.
4. Terjadi keterlambatan proses pelelangan berkaitan dengan kualifikasi panitia dan perusahaan rekanan.
5. Pemahaman terhadap mekanisme pencairan dana yang diatur dalam Perdirjen Nomor 66 tahun 2005 yang masih rendah.

Dari hasil pemetaan per wilayah KPPN, pada dasarnya permasalahan tersebut merata pada semua KPPN di wilayah Provinsi Maluku.

Rekomendasi yang dapat disarankan untuk mensikapi hal tersebut dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

- A. Langkah Antisipasi untuk TA. 2007
 1. Perlu ada peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan batasan waktu :
 - a. Penyampaian dokumen DIPA kepada satker/KPA baik oleh Gubernur maupun Kepala kanwil / Kepala Dinas yang bersangkutan
 - b. Penerbitan Surat Keputusan Penunjukkan KPA dan pengelola kegiatan lainnya
 2. Penyerahan kewenangan proses pencairan dana blokir/tanda bintang kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan sepanjang bukan merupakan kewenangan DJAPK (perubahan pagu, uraian program dan kegiatan)
- B. Langkah Percepatan Realisasi Semester II TA. 2006
 1. Melaksanakan resosialisasi Keppres Nomor 80 tahun 2003, Perdirjen Perbendaharaan Nomor 66 tahun 2005 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyaluran dana APBN.
 2. Monitoring penyerapan dana per wilayah KPPN secara intensif dan berjenjang, sehingga penumpukkan pembayaran di akhir tahun anggaran bisa diminimalisir.
 3. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengelola keuangan negara melalui pelatihan-pelatihan maupun kegiatan re-sosialisasi.



BAGIAN I
PERKEMBANGAN MONETER DAN
PEREKONOMIAN REGIONAL



1.1. Kondisi Umum

Kajian Perkembangan Perekonomian Daerah sejak tahun 2006 menggunakan data PDRB triwulanan berdasarkan tahun dasar 2000 yang selama ini masih menggunakan data PDRB tahunan. Evaluasi pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data PDRB triwulanan diharapkan dapat lebih memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang akurat dan terkini pada setiap triwulan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyempurnakan penghitungan PDRB dengan menggunakan tahun dasar 2000 menggantikan tahun dasar 1993 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini. Penggunaan tahun dasar 2000 karena berbagai pertimbangan, diantaranya adalah perekonomian Indonesia selama tahun 2000 yang relatif stabil, menghilangkan bias data akibat periode krisis ekonomi dan beberapa pertimbangan lainnya yang semuanya bermuara pada validitas data yang lebih terjamin.

Selama triwulan III tahun 2006, laju pertumbuhan ekonomi tahunan (y-o-y) Provinsi Maluku tercatat peningkatan namun terjadi perlambatan dibandingkan dengan selama triwulan I dan II tahun 2006. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, PDRB Provinsi Maluku mengalami peningkatan dan bahkan merupakan pertumbuhan triwulanan tertinggi ditahun 2006. PDRB Maluku (atas dasar harga konstan tahun 2000) pada triwulan laporan tumbuh 4,08% (y-o-y) dibanding selama triwulan III tahun sebelumnya. Secara triwulanan, PDRB Maluku mencatat peningkatan dibandingkan triwulan II tahun 2006 yaitu sebesar 4,02% dari Rp832,77 Miliar² selama triwulan II tahun 2006 naik menjadi Rp866,24 Miliar selama triwulan III tahun 2006.

1.2. Perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Maluku³

Dari sisi pengeluaran (permintaan), konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi tahunan. Sementara itu perubahan stok masih menunjukkan kontraksi.

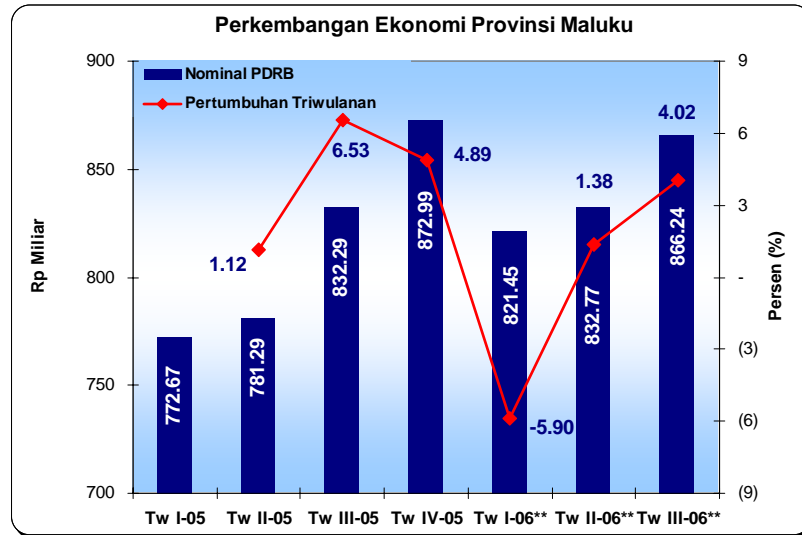
² merupakan hasil koreksi perhitungan pada triwulan II tahun 2006 yang tercatat sebesar Rp797,76%

³ Seluruh olahan data PDRB bersumber dari BPS Provinsi Maluku bekerjasama dengan Bank Indonesia Ambon.

Pertumbuhan tahunan (y-o-y) : pertumbuhan triwulan III tahun 2006 terhadap triwulan III tahun 2005

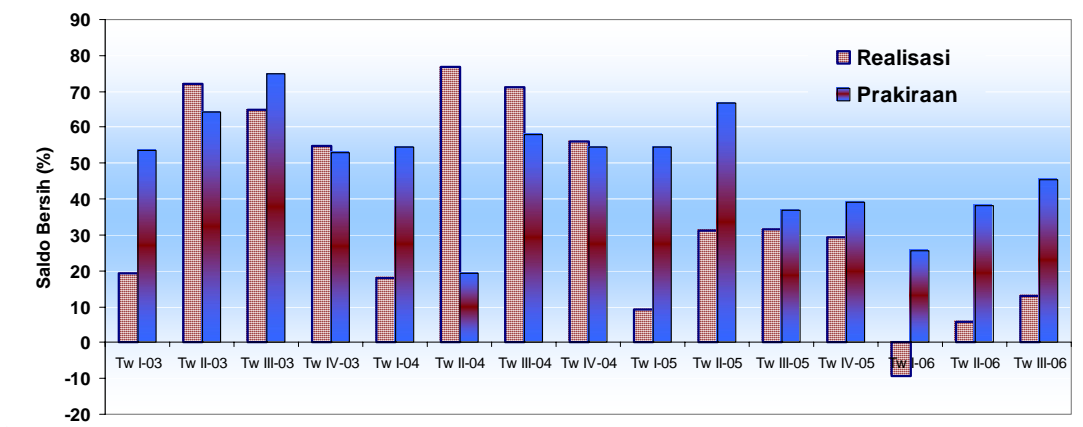
Pertumbuhan triwulanan (q-t-q) : pertumbuhan triwulan III tahun 2006 terhadap triwulan II tahun 2006

Grafik 1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Maluku



Ketergantungan Maluku akan barang-barang impor pada periode laporan mulai berkurang. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kontribusi ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekspor Maluku sedikit lebih besar dibanding impor namun secara nominal Maluku masih terjadi net impor atau jumlah impor lebih besar daripada jumlah ekspor.

Grafik 2. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Provinsi Maluku

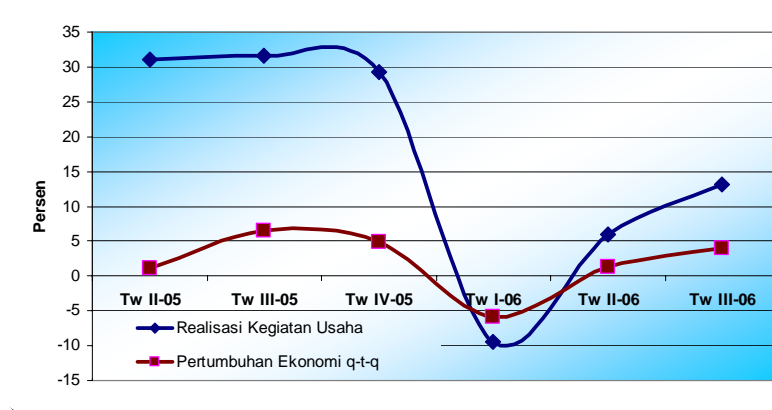


Dari sisi penawaran (produksi), kontributor utama pertumbuhan ekonomi tahunan adalah sektor perdagangan, hotel & restoran, diikuti sektor pertanian serta sektor angkutan & komunikasi. Sementara itu sektor industri pengolahan dan sektor



Konstruksi/Bangunan mengalami kontraktif. Pola pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha sampai dengan triwulan laporan di mana terjadi peningkatan kegiatan ekonomi di triwulan laporan yang ditunjukkan oleh besar saldo bersih positif (lebih banyak perusahaan yang usahanya meningkat dibanding yang menurun).

Grafik 3. Perbandingan Realisasi Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan



1.2.1. Permintaan Daerah

Pada triwulan laporan, Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) dan Konsumsi Pemerintah Maluku mencatat pertumbuhan tahunan tertinggi yaitu masing-masing 8,03% (y-o-y) dan 6,88% (y-o-y). Semakin membaiknya kondisi keamanan di Maluku dan membaiknya iklim investasi merupakan faktor pendukung pertumbuhan tersebut. Sementara itu konsumsi lainnya baik rumah tangga, maupun lembaga nirlaba juga mencatat pertumbuhan tahunan positif masing-masing 4,72% dan 4,49%. Untuk melihat secara jelas nominal perkembangan PDRB Maluku dari sisi permintaan setiap triwulan dapat dilihat pada tabel 1.



Tabel 1. Perkembangan PDRB Maluku Sisi Permintaan

No.	Jenis Pengeluaran	2005				2006 **		
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
1	Konsumsi Rumah Tangga	577.05	580.26	580.31	597.60	582.31	588.50	607.67
2	Konsumsi Lembaga Nirlaba	14.93	15.11	15.36	15.77	15.79	15.83	16.05
3	Konsumsi Pemerintah	187.67	189.70	192.37	200.99	190.42	196.24	205.60
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27.42	27.90	28.63	29.56	29.19	29.20	30.92
5	Perubahan Stok	0.12	0.77	48.69	54.43	29.65	35.39	40.16
6	Ekspor	104.29	106.72	108.95	109.78	110.85	111.50	116.20
7	Impor (-)	138.81	139.16	142.02	135.14	136.76	143.90	150.39
	TOTAL	772.67	781.29	832.29	872.99	821.45	832.77	866.24

Sumber : Kerjasama Bank Indonesia Ambon dengan BPS Maluku

***) Angka Sangat Sementara

Dari sisi permintaan, selama triwulan laporan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah mempunyai sumbangan yang dominan dalam pertumbuhan ekonomi Maluku. Konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan 3,29% dan konsumsi pemerintah memberikan sumbangan 1,59% terhadap total pertumbuhan ekonomi 4,08%. Kinerja ekspor juga turut memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun lebih kecil (0,87%). Tingginya dominasi sumbangan konsumsi rumah tangga dan pemerintah dikarenakan meningkatnya konsumsi masyarakat akan barang dan jasa serta telah berjalannya proyek pemerintah.

Tabel 2. Pertumbuhan dan Sumbangan Tahunan PDRB Maluku Sisi Permintaan

No.	Jenis Pengeluaran	Nominal Tw III-05	Nominal Tw III-06**	Pertumbuhan Tahunan (%)	Sumbangan Tahunan (%)
1	Konsumsi Rumah Tangga	580.31	607.67	4.72	3.29
2	Konsumsi Lembaga Nirlaba	15.36	16.05	4.49	0.08
3	Konsumsi Pemerintah	192.37	205.60	6.88	1.59
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28.63	30.92	8.03	0.28
5	Perubahan Stok	48.69	40.16	-17.51	-1.02
6	Ekspor	108.95	116.20	6.65	0.87
7	Impor (-)	142.02	150.39	5.89	1.01
	TOTAL	832.29	866.24	4.08	4.08

Sumber : Kerjasama Bank Indonesia Ambon dengan BPS Maluku

***) Angka Sangat Sementara

Secara triwulanan (q-t-q), seluruh jenis pengeluaran memberikan kontribusi positif bahkan cukup tinggi. Ekspor yang selama triwulan I tahun 2006 merupakan satu-satunya jenis pengeluaran yang memberikan sumbangan positif, pada laporan



mengalami percepatan dengan pertumbuhan triwulanan 4,22% (q-t-q) hanya mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi triwulanan sebesar 0,56%. Sebagai faktor pengurang pertumbuhan ekonomi, impor triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 4,51% (q-t-q) dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan triwulanan impor yang lebih tinggi dibanding ekspor disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat akan komoditi dari luar Maluku menjelang lebaran. Dominasi yang tinggi dari konsumsi rumah tangga (2,30%) menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ketika terjadi kenaikan konsumsi rumah tangga selama triwulan laporan sebesar 3,26% dibanding triwulan sebelumnya.

Tabel 3. Pertumbuhan & Sumbangan Triwulanan PDRB Maluku Sisi Permintaan

No.	Jenis Pengeluaran	2005			2006 **		
		Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
Pertumbuhan Triwulanan (% , q-t-q)							
1	Konsumsi Rumah Tangga	0.56	0.01	2.98	-2.56	1.06	3.26
2	Konsumsi Lembaga Nirlaba	1.22	1.66	2.67	0.08	0.28	1.41
3	Konsumsi Pemerintah	1.08	1.41	4.48	-5.26	3.06	4.77
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.74	2.62	3.26	-1.25	0.05	5.89
5	Perubahan Stok	553.41	6257.38	11.79	-45.53	19.37	13.48
6	Ekspor	2.33	2.09	0.76	0.97	0.59	4.22
7	Impor (-)	0.25	2.05	-4.84	1.20	5.22	4.51
	TOTAL	1.12	6.53	4.89	-5.90	1.38	4.02
Sumbangan Jenis Pengeluaran Triwulanan (% , q-t-q)							
1	Konsumsi Rumah Tangga	0.41	0.01	2.08	-1.75	0.75	2.30
2	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0.02	0.03	0.05	0.00	0.01	0.03
3	Konsumsi Pemerintah	0.26	0.34	1.04	-1.21	0.71	1.12
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	0.06	0.09	0.11	-0.04	0.00	0.21
5	Perubahan Stok	0.08	6.13	0.69	-2.84	0.70	0.57
6	Ekspor	0.31	0.29	0.10	0.12	0.08	0.56
7	Impor (-)	0.05	0.37	-0.83	0.19	0.87	0.78
	TOTAL	1.12	6.53	4.89	-5.90	1.38	4.02

Sumber : Kerjasama Bank Indonesia Ambon dengan BPS Maluku

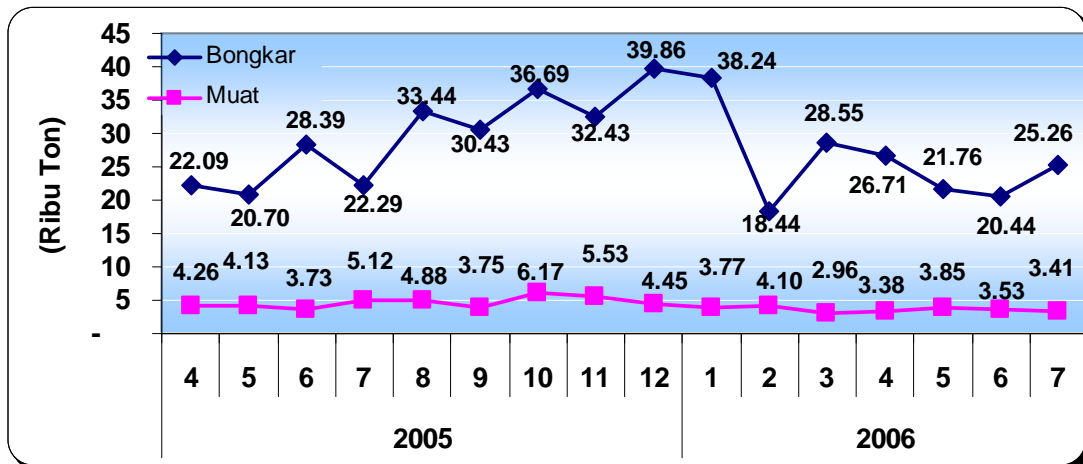
***) Angka Sangat Sementara

Kondisi Net-Impor Provinsi Maluku di lapangan dapat diindikasikan melalui arus barang melalui pelabuhan dan bandar udara. Pada grafik berikut tampak jelas bahwa barang yang keluar dari Maluku (muat) jauh lebih kecil dibanding barang yang masuk



(bongkar) ke Maluku melalui pelabuhan dan bandar udara. Jika dikalkulasikan secara rata-rata maka jumlah barang yang keluar Maluku sebanyak 15% dibanding jumlah barang yang masuk ke Maluku. Distribusi barang yang didominasi melalui pelabuhan selama setahun terakhir menunjukkan tren peningkatan pada arus bongkar barang sedangkan arus muat barang cenderung stabil bahkan sedikit mengalami tren penurunan khususnya di awal tahun 2006. Hal ini dapat dilihat pada arus bongkar barang pada bulan Juli 2005 sebesar 22,29 ribu ton menjadi 25,26 ribu ton pada bulan Juli 2006, sebaliknya pada arus muat barang pada bulan Juli 2005 sebesar 5,12 ribu ton menjadi 3,41 ribu ton pada bulan Juli 2006.

Grafik 4. Perkembangan Arus Barang Provinsi Maluku⁴ (Ribu Ton)



Sumber : Pelabuhan dan Bandar Udara Pattimura Ambon

1.2.2. Penawaran Daerah

Dari sisi penawaran, pada periode laporan kontributor utama pertumbuhan ekonomi tahunan adalah Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran, kemudian diikuti Sektor Pertanian dan Sektor Angkutan & Komunikasi. Sektor yang memberikan sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan triwulan laporan (terjadi penurunan) adalah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Konstruksi/Bangunan. Secara lengkap nominal perkembangan PDRB Maluku menurut sektor ekonomi tercantum pada tabel 4.

⁴ Arus Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan dan Bandar Udara Pattimura Ambon

Tabel 4. PDRB Sektoral Maluku Berdasarkan Harga Konstan Th. 2000 (Miliar)

No.	Sektor	2005				2006 **		
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
1	Pertanian	267.09	269.65	276.51	283.49	277.51	280.47	288.34
2	Pertambangan dan Penggalian	7.69	4.14	6.98	8.14	7.44	7.33	7.64
3	Industri Pengolahan	30.69	32.78	42.96	45.96	38.74	37.83	39.12
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.57	4.49	4.53	4.65	4.57	4.73	4.98
5	Konstruksi/Bangunan	9.35	9.84	11.56	10.89	10.45	10.60	11.29
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	195.66	198.29	201.67	206.75	202.49	205.67	215.43
7	Angkutan dan Komunikasi	77.36	76.11	82.66	82.72	81.91	84.31	88.46
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Per	44.38	45.07	45.68	46.35	45.64	46.27	47.57
9	Jasa-jasa Lainnya	135.87	140.91	159.74	184.03	152.68	155.56	163.41
	TOTAL	772.67	781.29	832.29	872.99	821.45	832.77	866.24

Sumber : Kerjasama Bank Indonesia Ambon dengan BPS Maluku

***) Angka Sangat Sementara

Dari 9 sektor ekonomi (lapangan usaha), pada triwulan laporan sebagian besar (7 sektor) mengalami pertumbuhan tahunan (y-o-y) positif. Pertumbuhan tahunan tertinggi dicapai oleh Sektor Listrik, Gas & Air Minum yang tercatat sebesar 9,85% (y-o-y) dari Rp4,53 Miliar pada triwulan III tahun 2005 menjadi Rp4,98 Miliar selama triwulan III tahun 2006, meskipun jika dilihat pangasanya terhadap total PDRB masih sangat kecil. Adapun sektor yang terus mengalami kontraksi terbesar pada periode laporan adalah Sektor Industri Pengolahan yang mengalami penurunan sebesar 8,93% (y-o-y) dibanding selama triwulan III tahun 2005.

Selanjutnya profil perekonomian daerah Maluku yang tergambar pada PDRB menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang dominan dalam membentuk struktur ekonomi Maluku adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel & restoran.

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Miliar)

No.	SEKTOR EKONOMI	Nominal Tw III-05	Nominal Tw III-06**	Pertumbuhan Tahunan (%)	Sumbangan Tahunan (%)
1	Pertanian	276.51	288.34	4.28	1.42
2	Pertambangan dan Penggalian	6.98	7.64	9.48	0.08
3	Industri Pengolahan	42.96	39.12	(8.93)	(0.46)
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	4.53	4.98	9.85	0.05
5	Konstruksi/Bangunan	11.56	11.29	(2.37)	(0.03)
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	201.67	215.43	6.82	1.65
7	Angkutan dan Komunikasi	82.66	88.46	7.01	0.70
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Per	45.68	47.57	4.15	0.23
9	Jasa-jasa Lainnya	159.74	163.41	2.30	0.44
	TOTAL	832.29	866.24	4.08	4.08

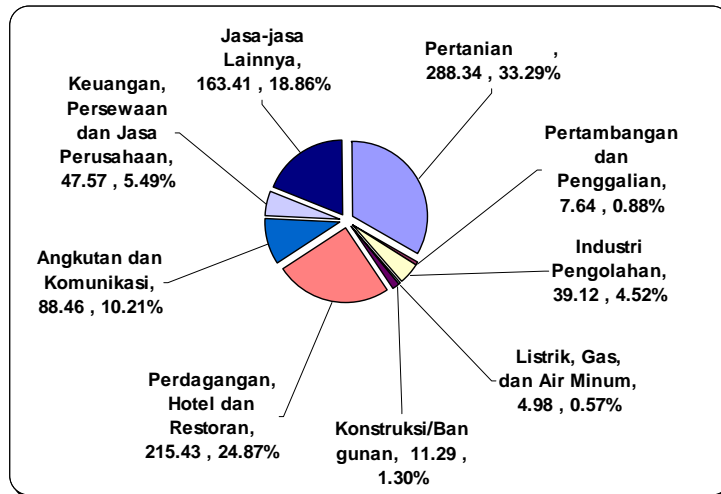
Sumber : Kerjasama Bank Indonesia Ambon dengan BPS Maluku

***) Angka Sangat Sementara

Secara lengkap urutan pangsa sektor ekonomi dalam perekonomian Maluku selama triwulan III tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- Pertanian = 33,29%
- Perdagangan, Hotel dan Restoran = 24,87%
- Jasa-jasa = 18,86%
- Angkutan dan Komunikasi = 10,21%
- Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan = 5,49%
- Industri Pengolahan = 4,52%
- Konstruksi/Bangunan = 1,30%
- Pertambangan dan Penggalian = 0,88%
- Listrik, Gas dan Air Minum = 0,57%

Grafik 5. Komposisi PDRB Sektoral Maluku Triwulan III tahun 2006 Berdasarkan Harga Konstan Tahun Dasar 2000 (Miliar, %)



Secara triwulanan, terjadi peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan di seluruh sektor ekonomi. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran mengalami pertumbuhan triwulanan tertinggi yaitu 1,17%. Disisi lain sektor yang masih berjalan cukup lambat dibanding tahun sebelumnya adalah sektor Pertambangan & Penggalian, Industri Pengolahan dan Jasa-jasa lainnya. Fakta tersebut ditunjukkan oleh rendahnya rata-rata pertumbuhan triwulanan pada tahun 2006 dibanding pada tahun 2005. Faktor kenaikan biaya produksi dan kekurangan bahan baku serta tenaga kerja menjadi faktor penyebab terjadinya kontraksi pada Sektor tersebut khususnya pada industri

pengolahan kayu dan perikanan. Hal ini didukung oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang masih menunjukkan pesimisme pengusaha terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan keberanian untuk investasi karena biaya operasional dan tenaga kerja yang ada sudah cukup mahal.

Tabel 6. Pertumbuhan dan Sumbangan Triwulanan PDRB Maluku

No.	Sektor	2005			2006 **		
		Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
Pertumbuhan Triwulanan (% , q-t-q)							
1	Pertanian	0.96	2.55	2.52	-2.11	1.06	2.81
2	Pertambangan dan Penggalian	-46.23	68.73	16.65	-8.57	-1.58	4.30
3	Industri Pengolahan	6.80	31.06	6.99	-15.72	-2.33	3.41
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	-1.76	0.84	2.71	-1.70	3.42	5.20
5	Konstruksi/Bangunan	5.35	17.43	-5.76	-4.05	1.44	6.44
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.35	1.70	2.52	-2.06	1.57	4.75
7	Angkutan dan Komunikasi	-1.62	8.61	0.06	-0.97	2.93	4.92
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.55	1.34	1.47	-1.53	1.38	2.81
9	Jasa-jasa Lainnya	3.71	13.36	15.21	-17.04	1.88	5.05
	TOTAL	1.12	6.53	4.89	-5.90	1.38	4.02
Sumbangan Sektoral Triwulanan (% , q-t-q)							
1	Pertanian	0.33	0.88	0.84	-0.68	0.36	0.95
2	Pertambangan dan Penggalian	-0.46	0.36	0.14	-0.08	-0.01	0.04
3	Industri Pengolahan	0.27	1.30	0.36	-0.83	-0.11	0.15
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.02	0.03
5	Konstruksi/Bangunan	0.06	0.22	-0.08	-0.05	0.02	0.08
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.34	0.43	0.61	-0.49	0.39	1.17
7	Angkutan dan Komunikasi	-0.16	0.84	0.01	-0.09	0.29	0.50
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.09	0.08	0.08	-0.08	0.08	0.16
9	Jasa-jasa Lainnya	0.65	2.41	2.92	-3.59	0.35	0.94
	TOTAL	1.12	6.53	4.89	-5.90	1.38	4.02

Sumber : Kerjasama Bank Indonesia Ambon dengan BPS Maluku

***) Angka Sangat Sementara

1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kotamadya

Berdasarkan daerah Kabupaten/Kotamadya, pada periode laporan kontributor utama pertumbuhan ekonomi Maluku adalah masih tetap Kota Ambon yang sekaligus ibukota provinsi. Satu-satunya kabupaten yang masih memberikan sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan Maluku adalah Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal ini tentunya menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah memiliki

kepala daerah definitif agar dapat dengan segera meningkatkan kinerja perekonomiannya. Secara lengkap nominal perkembangan PDRB Maluku menurut daerah Kabupaten/Kotamadya tercantum pada tabel berikut :

Tabel 7. Perkembangan PDRB Maluku Menurut Daerah Kabupaten/Kotamadya

No.	Kabupaten/Kota	2005				2006 **		
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
1	Maluku Tenggara Barat	91.24	92.45	95.18	98.24	93.94	94.69	98.40
2	Maluku Tenggara	69.11	70.18	72.96	75.92	72.01	72.67	75.49
3	Kepulauan Aru	38.95	39.40	40.37	41.61	40.21	40.56	42.15
4	Maluku Tengah	113.21	115.65	124.21	130.88	122.56	125.08	129.62
5	Seram Bagian Barat	59.14	60.63	66.88	70.45	61.64	60.32	61.54
6	Seram Bagian Timur	29.32	26.13	30.57	32.70	31.16	31.28	32.18
7	Pulau Buru	56.33	57.29	60.85	63.34	60.50	61.04	62.71
8	Kota Ambon	315.36	319.55	341.27	359.85	339.43	347.13	364.16
	TOTAL	772.67	781.28	832.29	872.99	821.45	832.77	866.24

Sumber : Kerjasama Bank Indonesia Ambon dengan BPS Maluku

***) Angka Sangat Sementara

Dari delapan daerah tingkat II (Kabupaten/Kotamadya), pada triwulan III-2006 sebagian besar (7 daerah) mengalami pertumbuhan tahunan (y-o-y) positif.

**Tabel 8. Pertumbuhan & Sumbangan Tahunan PDRB Maluku
Menurut Daerah Kabupaten / Kotamadya**

No.	Kabupaten/Kota	Nominal Tw III-05	Nominal Tw III-06**	Pertumbuhan Tahunan (%)	Sumbangan Tahunan (%)
1	Maluku Tenggara Barat	95.18	98.40	3.38	0.39
2	Maluku Tenggara	72.96	75.49	3.47	0.30
3	Kepulauan Aru	40.37	42.15	4.40	0.21
4	Maluku Tengah	124.21	129.62	4.35	0.65
5	Seram Bagian Barat	66.88	61.54	-7.98	-0.64
6	Seram Bagian Timur	30.57	32.18	5.26	0.19
7	Pulau Buru	60.85	62.71	3.05	0.22
8	Kota Ambon	341.27	364.16	6.71	2.75
	TOTAL	832.29	866.24	4.08	4.08

Sumber : Kerjasama Bank Indonesia Ambon dengan BPS Maluku

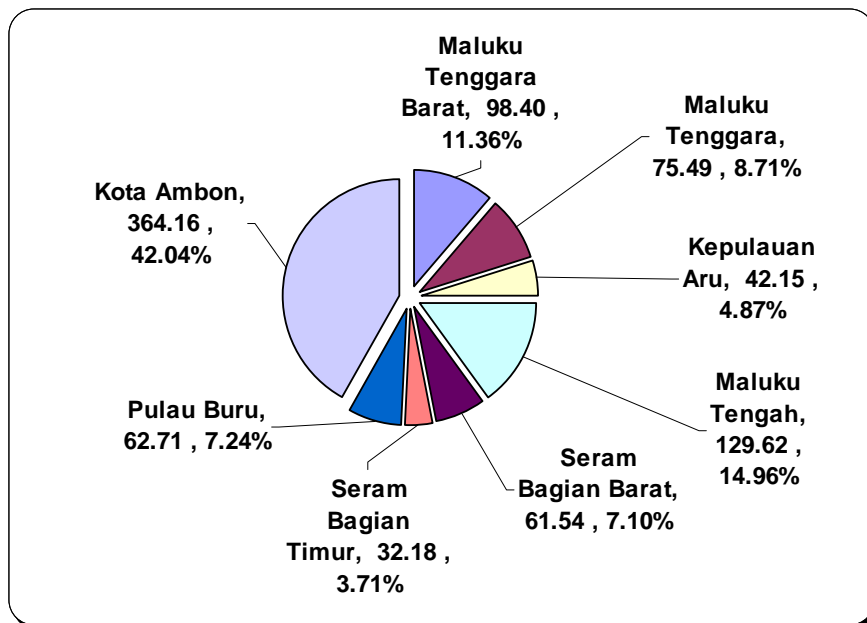
***) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan tahunan tertinggi dicapai oleh Kota Ambon yang tercatat sebesar 6,71% (y-o-y). Adapun satu-satunya daerah yang mengalami kontraksi pada periode laporan adalah Kabupaten Seram Bagian Barat yang mengalami penurunan sebesar 7,98% (y-o-y) dibanding selama triwulan III tahun 2005.

Secara lengkap urutan pangsa kabupaten/kotamadya dalam perekonomian Maluku selama triwulan III tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- Kota Ambon = 42,04%
- Kabupaten Maluku Tengah = 14,96%
- Kabupaten Maluku Tenggara Barat = 11,39%
- Kabupaten Maluku Tenggara = 8,71%
- Kabupaten Pulau Buru = 7,24%
- Kabupaten Seram Bagian Barat = 7,10%
- Kabupaten Kepulauan Aru = 4,87%
- Kabupaten Seram Bagian Timur = 3,71%

Grafik 6. Komposisi PDRB Maluku Menurut Daerah Kabupaten/Kotamadya



Secara triwulanan, terjadi peningkatan pada seluruh wilayah. Meskipun demikian jika dibandingkan tahun 2005 pertumbuhan triwulanan di tahun 2006 relatif lebih rendah.

Tabel 9. Pertumbuhan dan Sumbangan Triwulanan PDRB Maluku Menurut Daerah Kabupaten/Kotamadya

No.	Kabupaten/Kota	2005			2006 **		
		Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
Pertumbuhan Triwulanan (% , q-t-q)							
1	Maluku Tenggara Barat	1.32	2.95	3.22	-4.38	0.80	3.92
2	Maluku Tenggara	1.56	3.95	4.06	-5.14	0.91	3.88
3	Kepulauan Aru	1.16	2.46	3.08	-3.36	0.87	3.90
4	Maluku Tengah	2.15	7.41	5.37	-6.36	2.06	3.63
5	Seram Bagian Barat	2.51	10.31	5.35	-12.51	-2.15	2.03
6	Seram Bagian Timur	-10.88	16.97	6.99	-4.73	0.41	2.85
7	Pulau Buru	1.70	6.22	4.09	-4.48	0.88	2.75
8	Kota Ambon	1.33	6.80	5.44	-5.67	2.27	4.90
	TOTAL	1.12	6.53	4.89	-5.90	1.38	4.02
Sumbangan Per Kabupaten Triwulanan (% , q-t-q)							
1	Maluku Tenggara Barat	0.16	0.35	0.37	-0.49	0.09	0.45
2	Maluku Tenggara	0.14	0.36	0.36	-0.45	0.08	0.34
3	Kepulauan Aru	0.06	0.12	0.15	-0.16	0.04	0.19
4	Maluku Tengah	0.31	1.10	0.80	-0.95	0.31	0.54
5	Seram Bagian Barat	0.19	0.80	0.43	-1.01	-0.16	0.15
6	Seram Bagian Timur	-0.41	0.57	0.26	-0.18	0.02	0.11
7	Pulau Buru	0.12	0.46	0.30	-0.33	0.06	0.20
8	Kota Ambon	0.54	2.78	2.23	-2.34	0.94	2.04
	TOTAL	1.12	6.53	4.89	-5.90	1.38	4.02

Sumber : Kerjasama Bank Indonesia Ambon dengan BPS Maluku

**) Angka Sangat Sementara

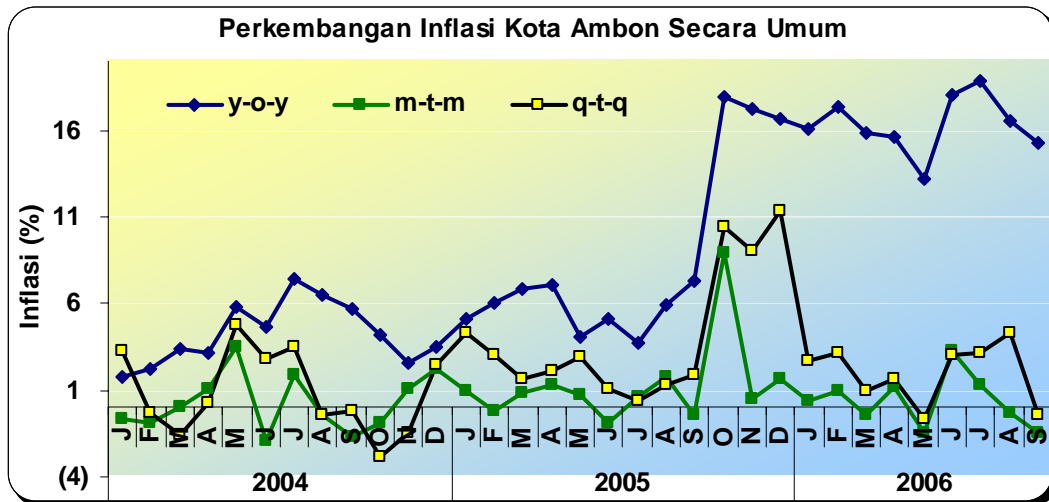
1.3. Pertumbuhan Inflasi

Selama triwulan III tahun 2006 Kota Ambon mengalami inflasi triwulanan (IHK September dibanding IHK Juni) sebesar -0,48% (q-t-q) atau mengalami deflasi (penurunan harga), sedangkan laju inflasi tahunan Kota Ambon pada akhir triwulan III tahun 2006 (September 2006 terhadap September 2005) sebesar 15,26%. Secara umum laju inflasi Kota Ambon pasca kenaikan harga BBM mulai berangsur-angsur turun terkecuali pada awal tahun yang cukup terganggu dengan kenaikan harga beras. Memasuki akhir triwulan II 2006, Kota Ambon mengalami inflasi yang cukup tinggi bahkan menjadi kota dengan inflasi tertinggi di seluruh Indonesia. Hal ini banyak disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi di Provinsi Maluku yang telah



mengganggu produksi petani sayur, bumbu-bumbuan dan juga hasil ikan tangkapan para nelayan. Curah hujan yang tinggi disertai badai pada triwulan II 2006 juga menghambat jalur distribusi bahan makanan impor dari Makassar, Surabaya maupun Manado bahkan di beberapa daerah fasilitas infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan banyak yang rusak/patah sehingga mengganggu jalur distribusi. Kondisi cuaca yang semakin membaik pada triwulan III 2006 menjadikan stabilitas harga kembali terjaga. Berbagai komoditi kembali turun harga dan bahkan Kota Ambon menjadi kota dengan deflasi bulanan terbesar secara nasional pada bulan September 2006.

Grafik 7. Perkembangan Laju Inflasi Kota Ambon



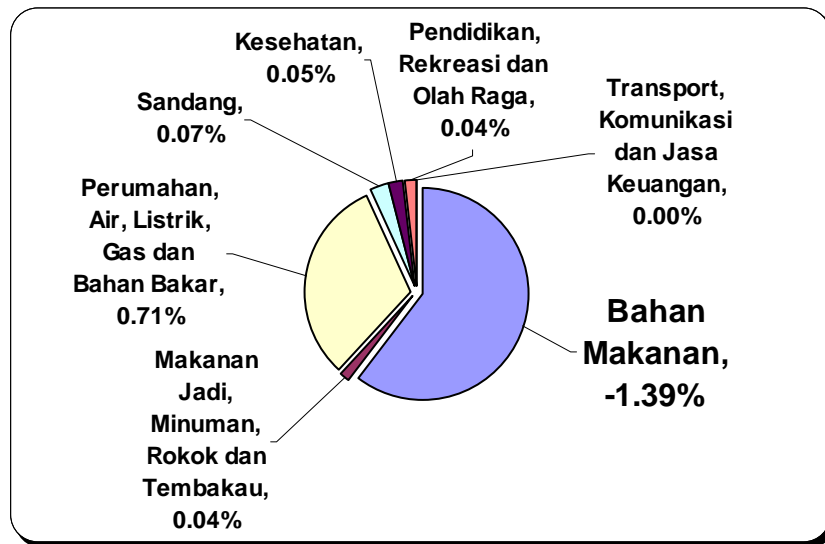
Terbentuknya deflasi sebesar 0,48% (q-t-q) pada triwulan III tahun 2006 terbesar disumbang oleh kelompok bahan makanan sebesar -1,39% dengan laju deflasi triwulanan -4,85%. Sedangkan kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan harga kecuali kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan yang tidak mengalami perubahan harga.

Tabel 10. Laju Inflasi Kota Ambon Triwulan III Tahun 2006

No	Kelompok Pengeluaran	Indeks Desember 2005	Indeks September 2006	Inflasi q-t-q Tw III-2006 (%)	Sumbangan Triwulanan	Inflasi y-t-d Sept '06 thd Des '05(%)	Inflasi y-o-y Sept '06 thd Sept '05(%)
1	Bahan Makanan	117.85	123.32	(4.85)	(1.39)	4.64	13.70
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	124.48	127.18	0.24	0.04	2.16	12.86
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	138.33	146.36	2.93	0.71	5.80	20.30
4	Sandang	122.3	125.86	0.78	0.07	2.91	5.53
5	Kesehatan	121.38	124.80	1.22	0.05	2.82	6.03
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	134.88	136.27	0.89	0.04	1.03	1.90
7	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	157.34	157.74	0.00	0.00	0.25	28.48
	UMUM	129.70	134.24	(0.48)	(0.48)	3.50	15.26

Sumber data : BPS diolah

Grafik 8. Sumbangan Inflasi Per Kelompok Triwulan III tahun 2006



Dua puluh komoditi utama penyumbang inflasi (kenaikan harga) Kota Ambon selama triwulan III tahun 2006 dan besar sumbangannya berturut-turut adalah Tukang Bukan Mandor (0,72%), Beras (0,16%), Daging Ayam Ras (0,12%), Lemon Cina (0,11%), Cabe Rawit (0,10%), Pepaya (0,07%), Emas Perhiasan (0,05%), Bayam (0,05%), Pisang (0,04%), Kangkung (0,07%) dan seterusnya hingga Sabun Cuci Batangan (0,01%). Sumbangan dan laju inflasi triwulanan dua puluh komoditi utama penyumbang inflasi Kota Ambon tersebut secara lengkap tercantum pada tabel 11.

Sementara itu dua puluh komoditi penyumbang deflasi (penurunan harga) terbesar selama triwulan III tahun 2006 beserta sumbangannya berturut-turut adalah : Ikan Layang (-0,39%), Bawang Putih (-0,36%), Bawang Merah (-0,29%), Ikan Tongkol (-0,25%), Tomat Sayur (-0,22%), Ikan Cakalang (-0,21) dan seterusnya hingga komoditi Kacang Tanah (-0,01). Besar sumbangan dan laju deflasi triwulanan dua puluh komoditi tersebut selama triwulan III tahun 2006 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 11. Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kota Ambon Triwulan III 2006

No.	Komoditi	Bobot	Inflasi Triwulanan	Sumbangan Triwulanan
1	Tukang Bukan Mandor	0.029	25.00	0.72
2	Beras	0.064	2.46	0.16
3	Daging Ayam Ras	0.008	14.87	0.12
4	Lemon Cina	0.003	42.86	0.11
5	Cabe Rawit	0.005	20.08	0.10
6	Pepaya	0.003	25.00	0.07
7	Emas Perhiasan	0.012	4.64	0.06
8	Bayam	0.004	15.43	0.05
9	Pisang	0.006	7.14	0.04
10	Kangkung	0.007	5.60	0.04
11	Selar	0.012	2.89	0.03
12	Kayu Balokan	0.006	5.39	0.03
13	Surat Kabar Harian	0.003	10.00	0.03
14	Hand Body Lotion	0.003	10.44	0.03
15	Pare	0.001	32.01	0.03
16	Minuman Ringan	0.003	7.08	0.02
17	Pasta Gigi	0.004	6.02	0.02
18	Baju Muslim	0.003	7.14	0.02
19	Nanas	0.002	6.67	0.02
20	Sabun Cuci Batangan	0.007	2.01	0.01

Sumber Data : BPS Diolah

Tabel 12. Komoditi Utama Penyumbang Deflasi Kota Ambon Triwulan III 2006

No	Komoditi	Bobot	Deflasi Triwulanan	Sumbangan Triwulanan
1	Layang	0.020	-19.31	-0.39
2	Bawang Putih	0.009	-40.10	-0.36
3	Bawang Merah	0.010	-29.07	-0.29
4	Tongkol	0.009	-27.10	-0.25
5	Tomat Sayur	0.006	-36.60	-0.22
6	Cakalang	0.010	-20.24	-0.21
7	Sawi Hijau	0.005	-27.27	-0.12
8	Tuna	0.001	-36.69	-0.05
9	Tauge/Kecambah	0.001	-31.75	-0.04
10	Daun Singkong	0.003	-12.46	-0.04
11	Wortel	0.001	-25.00	-0.04
12	Seragam Sekolah Anak	0.002	-15.91	-0.03
13	Jeruk	0.002	-14.29	-0.03
14	Daun Melinjo	0.002	-16.18	-0.03
15	Ketimun	0.001	-26.02	-0.02
16	Cakalang Asap	0.002	-14.78	-0.02
17	Labu Siam/Jipang	0.001	-19.15	-0.02
18	Kompot Minyak Tanah	0.002	-8.70	-0.02
19	Kol Putih/Kubis	0.001	-12.51	-0.01
20	Kacang Tanah	0.002	-8.33	-0.01

Sumber Data : BPS Diolah

Dari total 309 komoditi yang diamati perkembangan harganya di Kota Ambon selama triwulan III tahun 2006, terdapat 60 komoditi yang memberikan sumbangan inflasi sebesar 1,89% dan 49 komoditi memberikan sumbangan deflasi sebesar 2,37%, sedangkan 200 komoditi lainnya tidak ada perubahan harga selama triwulan III tahun 2006. Tinjauan inflasi masing-masing kelompok adalah sebagai berikut :

1.3.1. Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan selama triwulan III tahun 2006 mengalami deflasi sebesar 4,85% (q-t-q) sehingga selama setahun terakhir inflasi bahan makanan menjadi 13,70% (y-o-y). Inflasi tahunan sebesar 13,70% pada akhir triwulan III tahun 2006 tersebut disumbang oleh komoditi Beras yang memiliki andil terbesar (1,93%) dengan laju inflasi beras selama setahun sebesar 33,95%. Selain beras, komoditi lainnya penyumbang inflasi yang cukup besar kelompok ini selama setahun terakhir adalah Ikan



Selar, Cabe Rawit dan Lemon Cina yang masing-masing secara berurutan menyumbang 0,52%; 0,49%; 0,26% dengan inflasi tahunan untuk masing-masing komoditi sebesar 55,97%; 206,32% dan 163,93%. Sepuluh komoditi penyumbang inflasi tahunan kelompok bahan makanan tercantum pada tabel berikut :

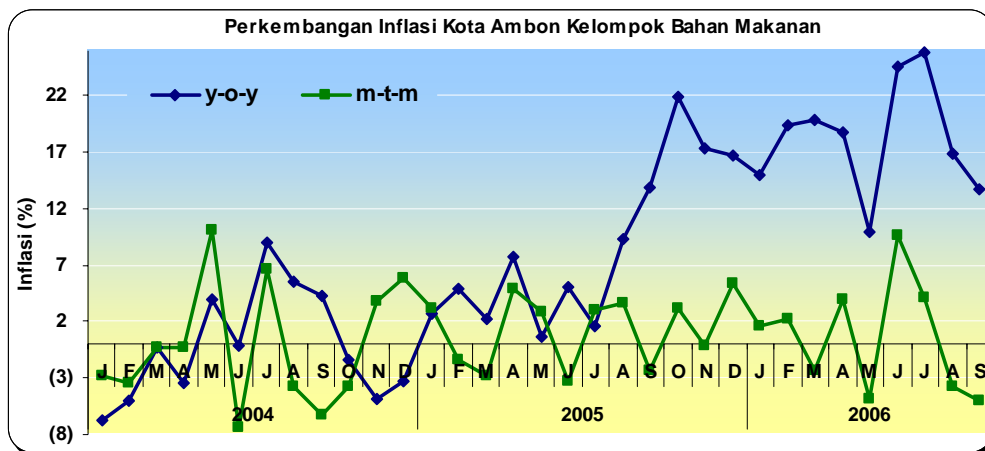
Tabel 13. Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Bahan Makanan

No.	Komoditi	Bobot	y-o-y	Sumbangan
1	Beras	0.057	33.95	1.93
2	Selar	0.009	55.97	0.52
3	Cabe Rawit	0.002	206.32	0.49
4	Lemon Cina	0.002	163.93	0.26
5	Daging Ayam Ras	0.009	19.52	0.18
6	Cabe Merah	0.003	56.21	0.17
7	Nanas	0.002	77.78	0.13
8	Ketela Pohon/Singkong	0.003	38.31	0.11
9	Pisang	0.007	15.38	0.10
10	Kangkung	0.008	12.32	0.10

Sumber : BPS diolah

Kelompok bahan makanan memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, hal ini ditunjukkan oleh acaknya pola inflasi kelompok ini selama 3 tahun terakhir. Dengan kondisi ini pemerintah daerah melalui dinas terkait diharapkan dapat menjaga kestabilan harga bahan makanan dengan memberikan kepastian kebijakan dan terus memantau ketersediaan bahan makanan dipasar dengan melakukan operasi pasar khususnya produk-produk yang berasal dari luar daerah seperti beras dan sayuran.

Grafik 9. Perkembangan Inflasi Bahan Makanan di Kota Ambon





1.3.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau pada triwulan III tahun 2006 mengalami inflasi sebesar 0,24% (q-t-q) sehingga selama setahun terakhir inflasi kelompok ini menjadi 12,86% (y-o-y). Dengan laju inflasi tahunan 100,00%, komoditi kue basah memiliki kontribusi terbesar (0,75%) dalam menyumbang inflasi kelompok ini selama setahun terakhir. Selain kue basah, komoditi lainnya penyumbang inflasi yang cukup besar kelompok ini adalah Nasi, Roti Manis dan Rokok Kretek Filter yang masing-masing secara berurutan menyumbang 0,41%, 0,37% dan 0,19% dengan inflasi tahunan sebesar 29,73%, 15,38% dan 9,09%. Secara lengkap 10 komoditi penyumbang inflasi terbesar kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau tercantum pada tabel berikut :

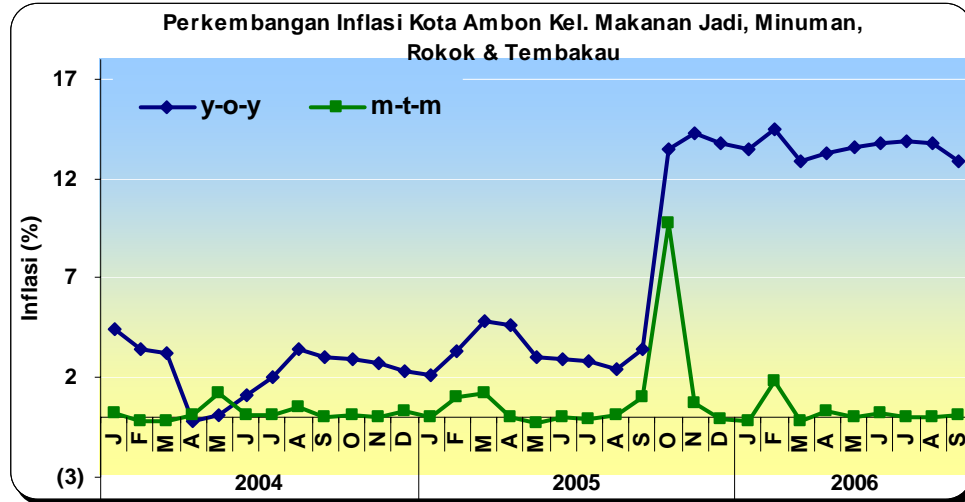
Tabel 14. Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

No.	Komoditi	Bobot	y-o-y	Sumbangan
1	Kue Basah	0.007	100.00	0.75
2	Nasi	0.014	29.73	0.41
3	Roti Manis	0.024	15.38	0.37
4	Rokok Kretek Filter	0.021	9.09	0.19
5	Kue Kering Berminyak	0.009	20.00	0.18
6	Minuman Ringan	0.003	24.93	0.09
7	Kopi Susu	0.001	28.40	0.04
8	Makanan Ringan/Snack	0.002	10.30	0.02
9	Sirop	0.001	15.50	0.01
10	Rokok Putih	0.008	0.89	0.01

Sumber : BPS diolah

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memiliki tingkat volatilitas yang rendah. Stabilitas harga makanan jadi telah terjaga selama tujuh bulan terakhir setelah pada bulan Februari 2006 terjadi sedikit kenaikan disebabkan oleh tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga beras. Sejalan dengan stabilnya harga beras maka harga makanan jadi pun mulai stabil, fenomena ini menunjukkan selain karena bahan baku dan kebijakan pemerintah, efek psikologis/ekspektasi masyarakat juga dapat menyebabkan inflasi yang tinggi.

Grafik 10. Perkembangan Inflasi Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau



1.3.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar pada triwulan III tahun 2006 mengalami inflasi sebesar 2,93% (q-t-q) sehingga selama setahun terakhir inflasi kelompok ini menjadi 20,30% (y-o-y). Dengan laju inflasi tahunan 92,34%, komoditi minyak tanah memberikan kontribusi yang terbesar (2,36%) dalam menyumbang inflasi Kota Ambon selama setahun terakhir. Selain minyak tanah, komoditi lainnya penyumbang inflasi yang cukup besar kelompok ini adalah Tukang Bukan Mandor dan Pasir yang menyumbang 1,26% dan 0,65% dengan inflasi tahunan sebesar 42,86% dan 140,00%. Munculnya komoditi Pasir sebagai penyumbang inflasi yang cukup besar disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga persediaan/produksi pasir yang berhasil diambil dari sungai-sungai di Kota Ambon berkurang. Secara lengkap 10 komoditi penyumbang inflasi terbesar kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar tercantum pada tabel 15.



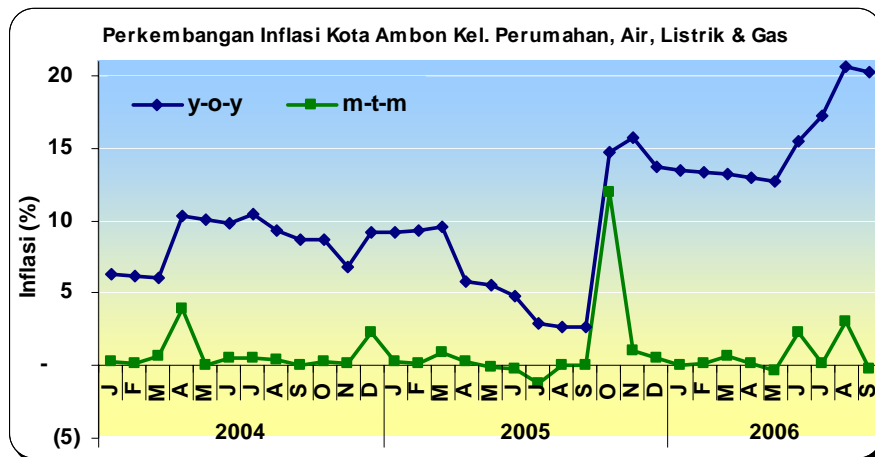
Tabel 15. Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

No.	Komoditi	Bobot	y-o-y	Sumbangan
1	Minyak Tanah	0.026	92.34	2.36
2	Tukang Bukan Mandor	0.029	42.86	1.26
3	Pasir	0.005	140.00	0.65
4	Batu Bata/Batu Tela	0.006	33.33	0.19
5	Semen	0.011	10.16	0.11
6	Sabun Cuci Batangan	0.007	12.94	0.09
7	Kain Gorden	0.003	30.77	0.09
8	Kayu Balokan	0.006	13.31	0.08
9	Seng	0.014	5.90	0.08
10	Kayu Lapis	0.003	9.22	0.03

Sumber : BPS diolah

Sama halnya dengan kelompok sebelumnya, bahwa stabilitas harga yang relatif sudah terpelihara dengan baik bahkan sempat terjadi deflasi pada beberapa periode sebelumnya dengan sangat drastis meningkat pada bulan Oktober akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan harga minyak tanah lebih dari 100%. Namun setelah itu inflasi kelompok ini kembali stabil hingga saat ini. Walaupun ada gangguan terhadap harga komoditi pada kelompok ini adalah karena produksi di Kota Ambon yang berkurang karena gangguan cuaca. Diperkirakan kondisi ini akan stabil kembali dengan membaiknya cuaca di Kota Ambon pada masa mendatang.

Grafik 11. Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Kota Ambon





1.3.4. Kelompok Sandang

Kelompok sandang pada triwulan III tahun 2006 mengalami inflasi sebesar 0,78% (q-t-q) sehingga selama setahun terakhir inflasi kelompok ini menjadi 6,05% (y-o-y). Dengan laju inflasi tahunan 5,53% (y-o-y), komoditi emas perhiasan memberikan kontribusi yang besar (0,20%) dalam menyumbang inflasi Kota Ambon selama setahun terakhir. Selain emas perhiasan, komoditi lainnya penyumbang inflasi cukup besar kelompok ini adalah celana panjang jeans dan celana panjang yang masing-masing secara berurutan menyumbang 0,06% dan 0,03% dengan inflasi tahunan masing-masing sebesar 46,67% dan 10,34%. Sepuluh komoditi penyumbang inflasi kelompok sandang tercantum pada tabel berikut :

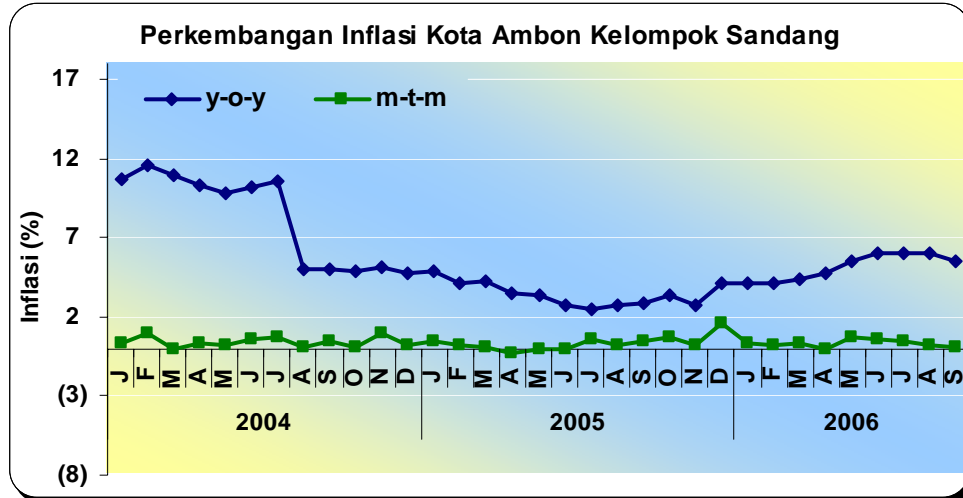
Tabel 16. Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Sandang

No.	Komoditi	Bobot	y-o-y	Sumbangan
1	Emas Perhiasan	0.013	15.17	0.20
2	Celana Panjang Jeans	0.001	46.67	0.06
3	Celana Panjang	0.003	10.34	0.03
4	Celana Pendek	0.001	25.00	0.03
5	Baju Kaos/T-Shirt	0.002	12.00	0.03
6	Ongkos Jahit	0.002	11.11	0.03
7	Kaos Oblong	0.001	39.29	0.02
8	Celana Panjang Jeans	0.002	12.53	0.02
9	Baju Muslim	0.003	7.14	0.02
10	Rok Luar Model Biasa	0.001	16.00	0.02

Sumber : BPS diolah

Kelompok sandang mempunyai pola yang berbeda dibanding kelompok sebelumnya. Kecenderungan harga yang menurun menjadikan kelompok ini relatif kecil dalam menyumbang inflasi secara umum. Daya beli masyarakat yang menurun sejak bulan Oktober menjadikan harga produk kelompok ini tidak dapat naik dengan cepat. Namun begitu dengan adanya sedikit gejolak rupiah saja beberapa saat lalu ditambah adanya spekulasi dimasyarakat, telah menjadikan emas perhiasan sebagai komoditi dengan sumbangan terhadap inflasi yang cukup tinggi. Disamping itu bulan ramadhan dan perayaan hari raya idul fitri 1426 H telah menaikkan harga komoditi baju muslim

Grafik 12. Perkembangan Inflasi Kelompok Sandang di Kota Ambon



1.3.5. Kelompok Kesehatan

Kelompok kesehatan pada triwulan III 2006 mengalami perubahan harga (inflasi) triwulanan sebesar 1,22% (q-t-q) sehingga selama setahun terakhir inflasi kelompok ini menjadi 6,03% (y-o-y). Dengan laju inflasi tahunan 41,43%, komoditi gunting rambut pria memberikan kontribusi terbesar (0,11%) kelompok ini dalam menyumbang inflasi selama setahun terakhir. Secara lengkap tujuh komoditi penyumbang inflasi terbesar kelompok kesehatan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 17. Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Kesehatan

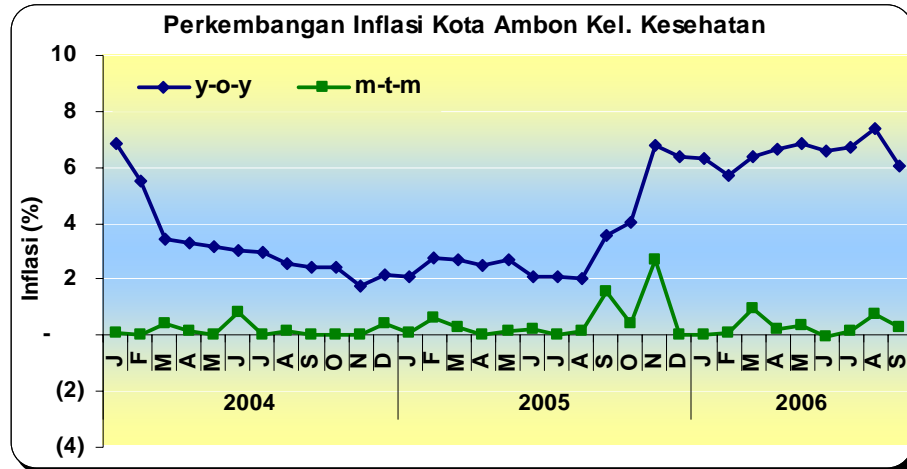
No.	Komoditi	Bobot	y-o-y	Sumbangan
1	Tarip Gunting Rambut Pria	0.003	41.43	0.11
2	Pasta Gigi	0.004	16.32	0.07
3	Alas Bedak	0.001	38.79	0.03
4	Hand Body Lotion	0.003	10.44	0.03
5	Creambath	0.001	33.33	0.02
6	Bedak	0.004	3.00	0.01
7	Pelembab	0.001	8.34	0.01

Sumber : BPS diolah

Tampak dari pola inflasi kelompok kesehatan bahwa momentum kenaikan harga BBM yang menurunkan daya beli penjual jasa gunting rambut pria, dijadikan sebagai saat yang tepat untuk menaikkan tarip yang sudah relatif lama tidak

mengalami perubahan. Selain itu komoditi perawatan jasmani dan kosmetika seperti pasta gigi, alas bedak dan hand body lotion juga mengalami sedikit kenaikan.

Grafik 13. Perkembangan Inflasi Kelompok Kesehatan di Kota Ambon



1.3.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga

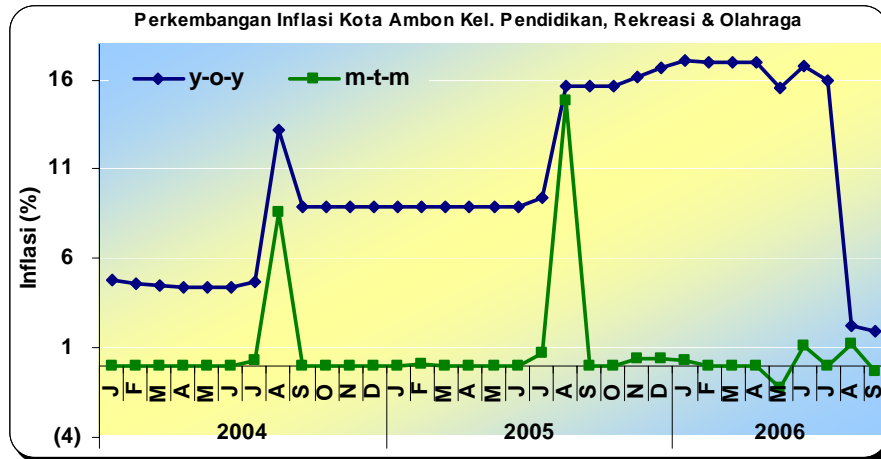
Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga pada triwulan III tahun 2006 mengalami inflasi triwulanan sebesar 0,89% (q-t-q) sehingga selama setahun terakhir inflasi kelompok ini menjadi 1,90% (y-o-y). Setelah memasuki ajaran baru ini produk pulpen memberikan sumbangan inflasi kelompok ini dengan kontribusi 0,03% terhadap inflasi Kota Ambon selama setahun terakhir. Secara lengkap 10 komoditi penyumbang inflasi terbesar kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tercantum pada tabel 18.

Tabel 18. Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kel. Pendidikan, Rekreasi & Olahraga

No.	Komoditi	Bobot	y-o-y	Sumbangan
1	Pulpen/Bollpoint	0.001	34.00	0.03
2	Surat Kabar Harian	0.003	10.00	0.03
3	Biaya Foto Copy	0.001	13.33	0.02
4	Rekreasi	0.000	50.00	0.01
5	Buku Bacaan/Pelajaran	0.002	7.68	0.01
6	Personal Komputer/Desktop	0.001	8.33	0.01
7	VCD / DVD Player	0.004	2.38	0.01
8	Pakaian Olah Raga Anak	0.000	20.00	0.01
9	Compact Disk (CD)	0.000	33.33	0.01
10	Sepatu Olah Raga Pria	0.001	11.11	0.01

Sumber : BPS diolah

Grafik 14. Perkembangan Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga



1.3.7. Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan

Kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan pada triwulan III tahun 2006 tidak mengalami perubahan harga secara triwulanan, namun selama setahun terakhir inflasi kelompok ini menjadi 28,48% (y-o-y). Meskipun hanya mengalami inflasi tahunan 50,00%, angkutan dalam kota sangat mendominasi inflasi kelompok ini dengan kontribusi 2,99% terhadap inflasi selama setahun terakhir. Selain tarip angkutan dalam kota, bensin dan kartu ATM merupakan komoditi dengan laju inflasi tahunan tertinggi yaitu sebesar 87,50% dan 20,88% (y-o-y) yang masing-masing menyumbang 0,52% dan 0,02% terhadap laju inflasi secara umum. Secara lengkap 5 komoditi penyumbang inflasi kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan pada tabel berikut :

Tabel 19. Komoditi Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan

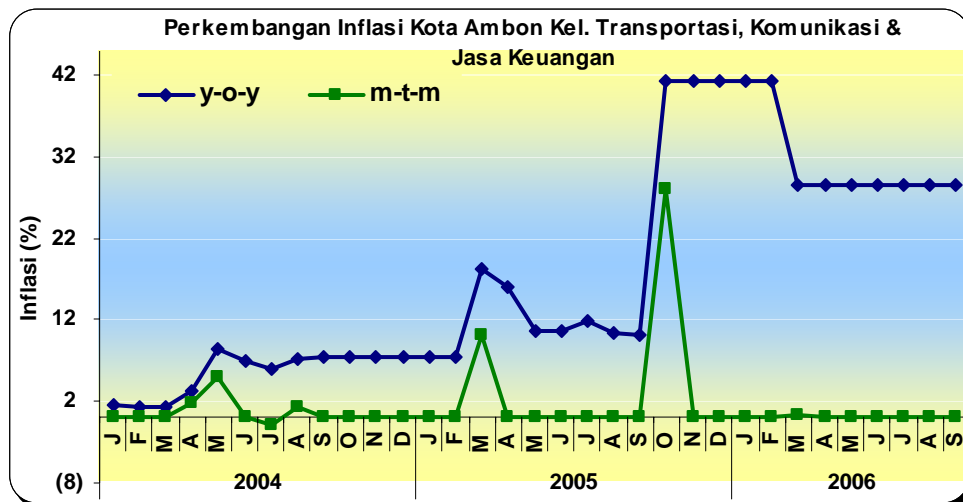
No.	Komoditi	Bobot	y-o-y	Sumbangan
1	Angkutan Dalam Kota	0.060	50.00	2.99
2	Bensin	0.006	87.50	0.52
3	Kartu ATM	0.001	20.88	0.02
4	Transfer Uang	0.006	3.56	0.02
5	Solar	0.000	95.43	0.01

Sumber : BPS diolah



Dari trend perkembangan selama lebih dari dua tahun terakhir tampak kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap laju inflasi kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan. Sub kelompok transport yang lebih dominan dalam menyumbang inflasi kiranya perlu diperhatikan, khususnya tarif angkutan dalam kota yang perlu diatur secara tegas. Memasuki triwulan IV 2006 inflasi kelompok ini diperkirakan akan turun seiring dengan tepat setahun kenaikan harga BBM per 1 Oktober 2005.

Grafik 15. Perkembangan Inflasi Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan



Box 2

KEBIJAKAN BARU MENDORONG INTERMEDIASI DAN KONSOLIDASI PERBANKAN

Untuk meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan pembangunan dan mendorong upaya penguatan industri perbankan melalui konsolidasi sesuai arah Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Bank Indonesia hari ini secara resmi mengumumkan Paket Kebijakan Perbankan Oktober 2006. "Dengan dikeluarkannya paket kebijakan ini, akan semakin membuka ruang gerak perbankan dalam menyalurkan kredit dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, serta mendorong tercapainya konsolidasi perbankan pada tahun 2010."

Paket Kebijakan Perbankan Oktober 2006 terdiri dari 14 Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur bank umum konvensional, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha syariah, BPR dan BPR syariah.

Kebijakan relaksasi atas beberapa ketentuan untuk mengoptimalkan intermediasi perbankan, dituangkan dalam **11 (sebelas) PBI** yang secara garis besar terdiri dari:

- Dua PBI terkait dengan Bank Umum yaitu : 1. PBI yang mengatur kembali ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum; 2. PBI yang akan menjadi landasan atas perlakuan khusus bidang perbankan bagi nasabah-nasabah bank di daerah yang tertimpa bencana di seluruh Indonesia;
- Empat PBI terkait dengan BPR yaitu : 1. PBI mengenai perubahan ketentuan permodalan BPR, yang antara lain mengubah bobot risiko kredit dalam perhitungan ATMR; 2. PBI yang mengubah ketentuan tentang kualitas aktiva produktif dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (KAP/PPAP), terutama mencakup penentuan kolektibilitas sesuai dengan karakteristik kredit BPR; 3. PBI perubahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR yang lebih akomodatif terhadap pelaksanaan *linkage program*; dan 4. PBI yang mengatur kembali Kelembagaan BPR, seperti relaksasi persyaratan pembukaan Kantor Cabang BPR dan relaksasi kualifikasi calon Direktur, terutama dalam rangka mendorong kehadiran BPR di wilayah Indonesia Timur;
- Lima PBI terkait dengan Perbankan Syariah yaitu: 1. PBI yang menyesuaikan ketentuan penilaian kualitas aktiva bank umum berdasarkan syariah; 2. PBI tentang perubahan ketentuan tentang perhitungan *Financing Deposit Ratio* (FDR) didalam ketentuan Giro Wajib Minimum; Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada ketentuan Bank Umum Syariah dan BPR konvensional, maka terdapat pula perubahan atas PBI untuk BPRS sbb: 3. PBI yang mengubah ketentuan tentang permodalan (KPM) BPRS; 4. PBI mengenai perubahan kualitas aktiva BPRS; dan 5. PBI yang merelaksasi pengembangan usaha dan jaringan kantor BPRS.

Relaksasi ketentuan BMPK, seyogyanya akan dapat menjawab perhatian dari berbagai pihak, serta dapat memperjelas tata hubungan para pihak terkait dalam kegiatan usaha perbankan. PBI ini mencakup hal-hal signifikan yang akan dapat memberikan ruang gerak dan keleluasaan bagi industri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dengan cara mendefinisikan kembali pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pihak terkait dengan bank, cakupan perhitungan BMPK kepada pihak terkait, penegasan pengaturan pengelompokan peminjam sebagai akibat hubungan keuangan, serta perluasan sektor ekonomi yang dinilai dapat menunjang pencapaian pembangunan ekonomi nasional terkait dengan penyediaan dana bank kepada badan usaha milik negara. "Dengan adanya relaksasi kebijakan ini, sudah saatnya industri perbankan berupaya mengoptimalkan fungsinya dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil".

Sementara itu, kebijakan untuk menciptakan industri perbankan nasional yang sehat, kuat, dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai visi API dituangkan dalam **3 (tiga) PBI**. Dua PBI terkait dengan upaya-upaya untuk mengkonsolidasikan industri perbankan Indonesia, yaitu: Pertama, PBI mengenai *Single Presence Policy* (SPP) atau Kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia; dan Kedua, PBI yang memberikan insentif kepada bank-bank yang melakukan merger. Sedangkan PBI yang Ketiga adalah PBI untuk penyempurnaan ketentuan *good corporate governance* (GCG).

Terkait kebijakan SPP, ditetapkan bahwa penyesuaian struktur kepemilikan wajib dilaksanakan paling lambat akhir Desember 2010. Perpanjangan waktu dapat diberikan apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan bank-bank yang dikendalikannya menghadapi kompleksitas permasalahan yang tinggi.

Untuk insentif merger, PBI yang dikeluarkan merupakan bagian dari komitmen BI pada Paket Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) khususnya program perbaikan institusi dan struktur pasar yang harus diselesaikan pada Oktober 2006. Berbagai kemudahan diberikan bagi bank-bank yang akan melakukan merger, seperti: pemberian izin menjadi bank devisa, kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah, perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi, kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank; serta penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*.

Sementara itu, tujuan dari perubahan PBI tentang pelaksanaan GCG bank umum adalah memperkuat industri perbankan nasional sesuai API, antara lain melalui peningkatan kualitas penerapan GCG, peningkatan peran Dewan Komisaris dan Direksi serta memperjelas definisi komisaris independen dan pihak independen.



BAGIAN II

PERKEMBANGAN PERBANKAN REGIONAL

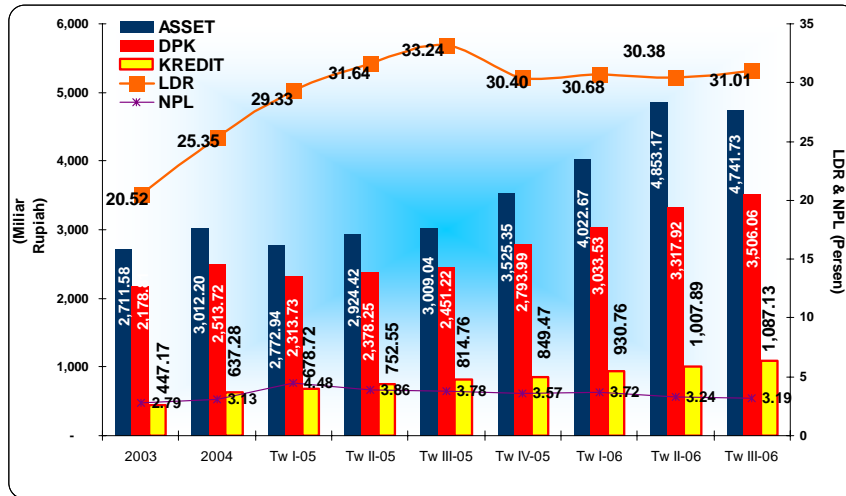


2.1. Perkembangan Kinerja Perbankan

Pada triwulan III 2006, total kredit yang disalurkan perbankan di Maluku sebesar Rp. 1,09 triliun, mengalami peningkatan baik selama satu triwulan (q-t-q) yaitu sebesar 7,86% maupun selama satu tahun (y-o-y) yaitu sebesar 33,4%. Demikian pula dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan sebesar 3,5 triliun mengalami peningkatan baik selama satu triwulan (q-t-q) sebesar 5,67% maupun selama satu tahun (y-o-y) sebesar 43,04%.

Intermediasi perbankan yang ditunjukkan perbandingan antara kredit terhadap DPK atau Loan to Deposit Ratio (LDR) dibanding triwulan sebelumnya (q-t-q) meningkat dari 30,38% menjadi 31,01%, hal ini dikarenakan pertumbuhan kredit lebih tinggi daripada DPK. Sedangkan dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-o-y) menurun dari 33,24% menjadi 31,01%, yang disebabkan pertumbuhan DPK lebih tinggi daripada kredit.

Grafik 16. Perkembangan Indikator Pokok Perbankan



Sumber: LBU/LBPR

Angka LDR di Maluku berfluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh turun naiknya DPK, dan turun naiknya DPK sangat dipengaruhi oleh turun naiknya dana yang bersumber dari pemda yang umumnya berbentuk giro. Sedangkan DPK yang bersumber dari perorangan cenderung stabil dengan tren terus meningkat.



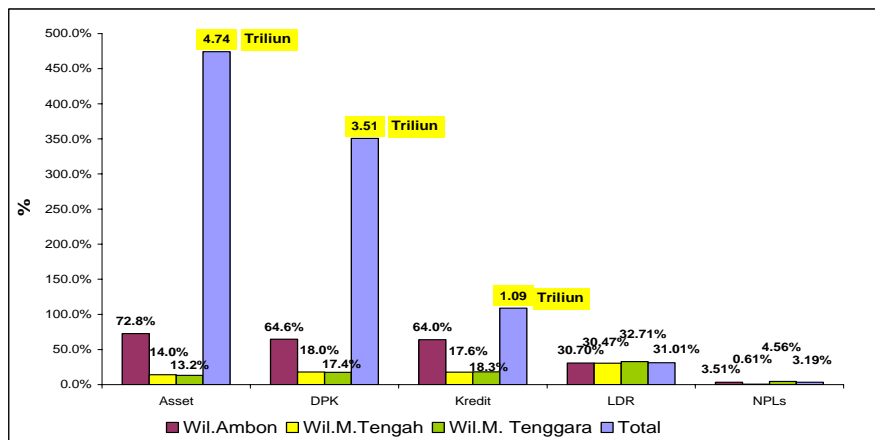
Perkembangan pangsa DPK dari perorangan berkisar antara 60-70% sedangkan dari pemda berkisar antara 20-30% dari total DPK.

Asset mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya sebesar Rp. 111,23 Miliar atau tumbuh -2,30%, namun kalau dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-o-y) masih lebih tinggi sebesar Rp. 1,7 triliun atau tumbuh 57,58%.

Kredit bermasalah perbankan terus menunjukkan penurunan hingga pada triwulan laporan sebesar 3,17%. Selain karena adanya perbaikan kualitas kredit, penyelesaian kredit bermasalah, juga disebabkan adanya penambahan kredit baru yang cukup tinggi. Adapun Realisasi kredit baru selama triwulan III 2006 sebesar Rp. 156,7 Miliar, meningkat Rp. 10,1 Miliar dibanding triwulan sebelumnya.

Sementara dilihat perwilayah, kegiatan perbankan didominasi di wilayah Ambon (Kodya Ambon) dengan jumlah persentase asset, dpk dan kredit tertinggi yaitu diatas 60% dari total di Provinsi Maluku. Sedangkan sisanya terbagi di dua wilayah lainnya yaitu wilayah maluku tengah (Malteng, Buru, SBB, SBT) dan maluku tenggara (Maltengg, MTB, Kep. Aru), dengan persentase asset, dpk dan kredit relatif seimbang di kedua wilayah tersebut.

Grafik 17. Indikator Pokok Perbankan Perwilayah



Kalau dilihat persentase antara dpk yang dihimpun dengan kredit yang disalurkan (LDR) maka tertinggi terjadi di wilayah Maluku tenggara. Namun ekspansi kredit oleh perbankan di wilayah ini diikuti oleh jumlah kredit bermasalah yang

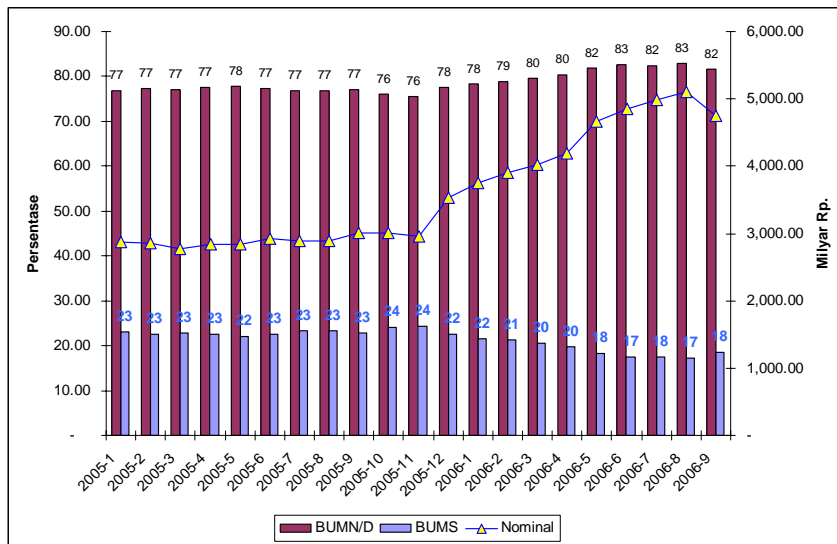


persentasenya tertinggi. Sedangkan untuk wilayah maluku tengah LDR nya terendah namun NPLs-nya juga paling rendah.

2.2. Asset Perbankan Maluku

Total asset perbankan di wilayah Maluku pada triwulan laporan (Tw III 2006) tercatat sebesar Rp 4.741,73 Miliar. Selama kurun waktu satu triwulan (q-t-q) mengalami penurunan sebesar Rp. 111,43 Miliar (2,3%). Namun selama kurun waktu setahun, yaitu dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya masih mengalami kenaikan Rp. 1.216,38 Miliar (34,5%). Penurunan asset terjadi baik pada bank pemerintah maupun swasta.

Grafik 18. Perbandingan Pangsa Asset BUMN/D & BUMS

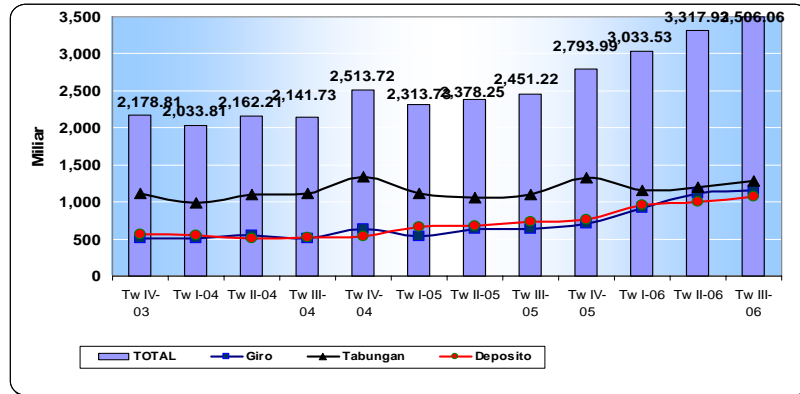


2.3. Penghimpunan Dana Masyarakat

Pada triwulan laporan total dana yang dihimpun perbankan di Maluku sebesar Rp. 3.506,06 Miliar. Selama satu triwulan (q-t-q) terjadi peningkatan sebesar Rp. 188,15 Miliar (5,67%) sedangkan selama setahun (y-o-y) terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.054,84 Miliar (43,03%).

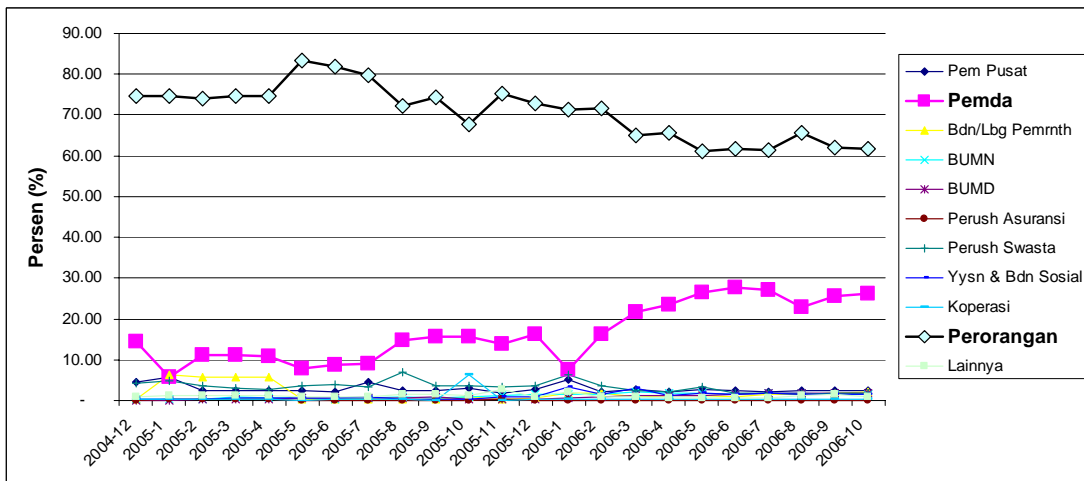


Grafik 19. Perkembangan Dana Masyarakat



Peningkatan terjadi pada jenis giro dan deposito sedangkan tabungan relatif stagnan walaupun tetap meningkat, hal ini menyebabkan pada triwulan laporan nampak bahwa ketiga jenis simpanan tersebut hampir berada pada titik yang sama/berimbang.

Grafik 20. Perkembangan Pangsa DPK per Deposan

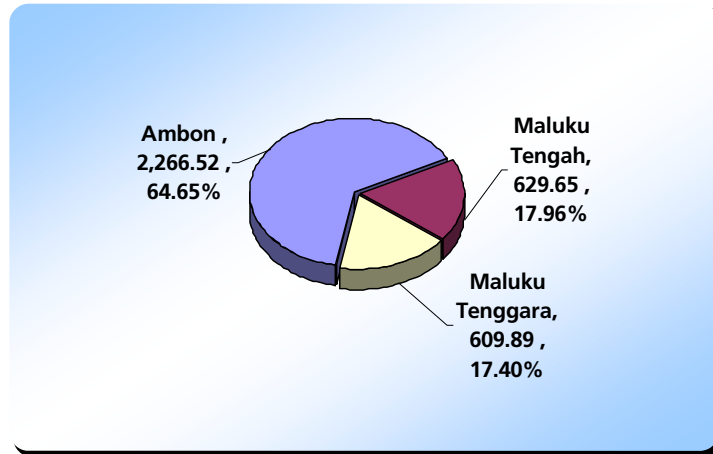


Peningkatan giro dan deposito disebabkan peningkatan dana yang bersumber dari pemda yang umumnya berupa kedua jenis simpanan tersebut.



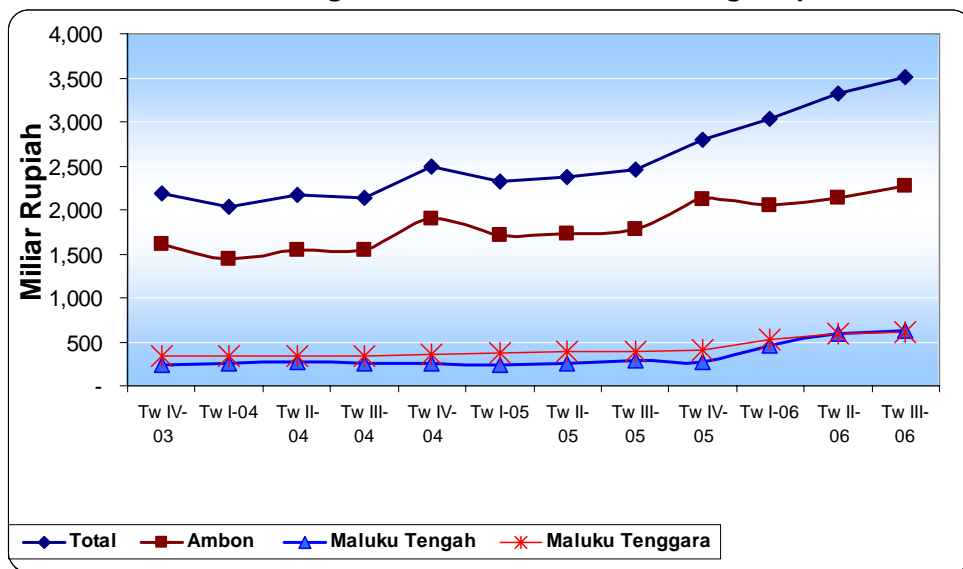
Pada triwulan laporan penghimpunan DPK masih didominasi di wilayah Kodya Ambon sebesar 64,65%, hal ini dikarenakan kegiatan perekonomian masih terpusat di kota Ambon.

Grafik 21. Komposisi DPK Menurut Lokasi Penghimpunan Dana Triwulan III Tahun 2006



Terjadi peningkatan DPK yang pesat di wilayah Maluku Tengah dimana pada 2 (dua) triwulan terakhir telah melewati wilayah Maluku Tenggara. Pada triwulan laporan wilayah Maluku Tengah mengalami pertumbuhan tertinggi baik secara tahunan (y-o-y) sebesar 120,52% maupun secara triwulanan (q-t-q) sebesar 7,32%.

Grafik 22. Perkembangan DPK Menurut Lokasi Penghimpunan Dana



2.4. Penyaluran Kredit Perbankan

Selain menghimpun dana, salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Dilihat berdasarkan letak kantor bank yang menyalurkan kredit maka terdapat 2 (dua) jenis kredit yaitu kredit berdasarkan bank pelapor dan kredit berdasarkan lokasi proyek. **Kredit berdasarkan bank pelapor (LBU & LBPR)** adalah kredit yang disalurkan oleh perbankan yang berada di wilayah Provinsi Maluku. **Kredit berdasarkan lokasi proyek** sebagaimana tercantum dalam buku SEKDA adalah total kredit yang disalurkan baik oleh perbankan yang berada di Prov. Maluku maupun yang berada di luar Prov. Maluku.

Tabel 20. Perbandingan Kredit Lokasi Proyek dan Kredit Bank Pelapor di Provinsi Maluku TW.III 2006

Keterangan	Kredit Berdsrkn LBU&LBPR *)	%	Kredit Berdskn Lokasi Proyek (Buku SEKDA)**)	%	Selisih/Kredit dr Perbankan di Luar Maluku	%
A. Wilayah	1,087,127	100%	1,771,878	100%	684,751	100%
1 Ambon	695,796	64%	930,974	53%	235,178	34%
2 Maluku Tengah	191,845	18%	560,401	32%	368,556	54%
3 Maluku Tenggara	199,486	18%	280,503	16%	81,017	12%
B. Kepemilikan	1,087,127	100%	1,771,878	100%	684,751	100%
1 BUMN/BUMD	919,502	85%	1,477,733	83%	558,231	83%
2 Swasta	167,625	15%	294,145	17%	126,520	17%
C. Jenis Penggunaan	1,087,127	100%	1,771,878	100%	684,751	100%
1 Modal Kerja	263,765	24%	551,515	31%	287,750	43%
2 Investasi	42,844	4%	426,350	24%	383,506	54%
3 Konsumsi	780,518	72%	794,013	45%	13,495	3%
D. Sektor Ekonomi	1,087,127	100%	1,771,878	100%	684,751	100%
1 Pertanian	7,672	1%	246,228	14%	238,556	33%
2 Pertambangan	-	0%	1,000	0%	1,000	1%
3 Industri	2,175	0%	416,012	23%	413,837	61%
4 Listrik, Gas & Air	-	0%	5	0%	5	0%
5 Konstruksi	83,265	8%	92,806	5%	9,541	1%
6 Perdag./Hotel/Rest	182,303	17%	187,473	11%	5,170	1%
7 Pengangkutan dll	11,882	1%	12,341	1%	459	0%
8 Jasa Dunia Usaha	8,542	1%	11,614	1%	3,072	0%
9 Jasa Sosial Masy.	8,132	1%	8,254	0%	122	0%
10 Lain-lain	783,156	72%	796,145	45%	12,989	3%

Ket: *) Kredit dr Perbankan di Prov. Maluku Posisi September 2006

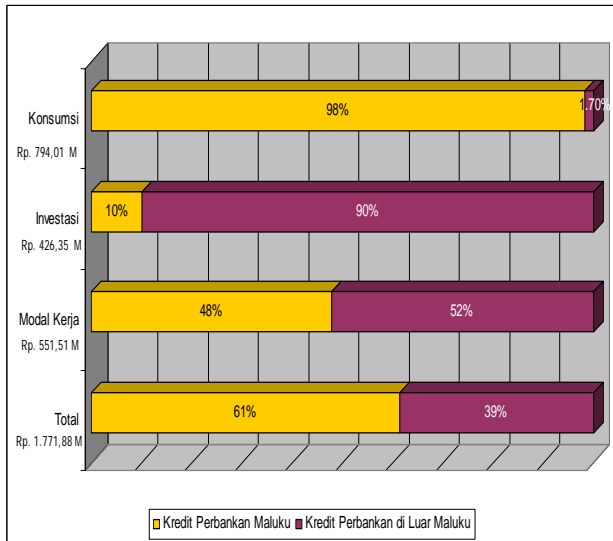
***) Total Kredit baik dr Perbankan di maupun dari luar Prov. Maluku Posisi September 2006

Total kredit lokasi proyek pada triwulan III 2006 sebesar Rp. 1.771,9 Miliar, sedangkan Total kredit bank pelapor, sebagaimana telah dibahas dibagian awal, sebesar Rp. 1.087,13 Miliar. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 684,75 M. Besarnya selisih tersebut mencerminkan besarnya kredit yang disalurkan perbankan

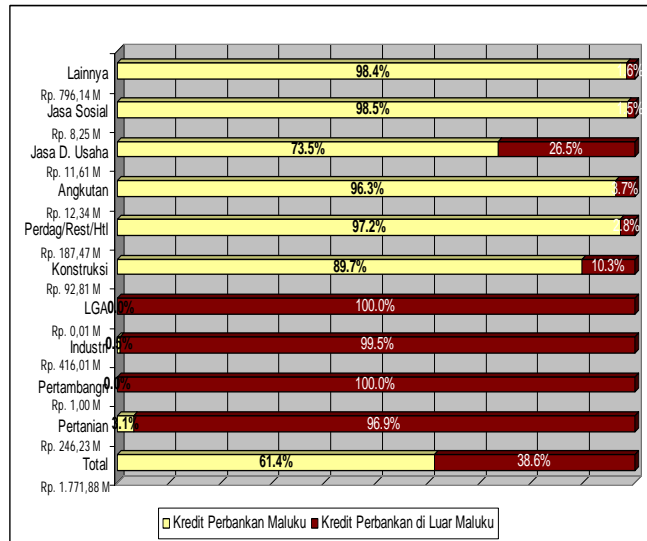


yang berada di luar Provinsi Maluku ke wilayah Prov. Maluku, dengan pangsa sebesar 39% dari total kredit. Kredit dari perbankan di luar Maluku tersebut terbanyak disalurkan oleh Bank Umum Milik Pemerintah dan tertinggi disalurkan ke wilayah Maluku Tengah. Berdasarkan jenis penggunaannya terbesar adalah kredit investasi, dan berdasarkan sektor ekonominya terbanyak disalurkan ke sektor industri.

Grafik 23. Perbandingan Kredit dari Perbankan Maluku dgn Kredit dari Perbankan di luar Maluku berdasarkan Jenis Penggunaan Posisi TW.III 2006



Grafik 24. Perbandingan Kredit dari Perbankan Maluku dgn Kredit dari Perbankan di luar Maluku berdasarkan Sektor Ekonomi Posisi TW.III 2006



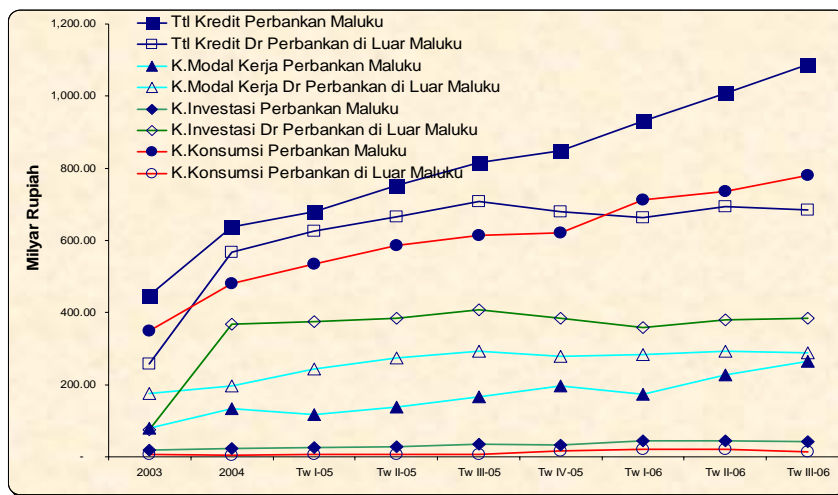
Dilihat perbandingan per jenis penggunaan dan sektor ekonominya, maka terlihat bahwa terjadi kebalikan dimana kredit yang disalurkan oleh perbankan di Maluku didominasi oleh kredit konsumtif dan sektor konsumtif sedangkan kredit dari perbankan di luar Maluku didominasi oleh kredit produktif (Modal Kerja & Investasi) dan sektor-sektor produktif.

Dilihat perkembangannya maka kredit dari perbankan di Maluku trendnya terus meningkat sedangkan kredit dari perbankan di luar Maluku menurun. Perkembangan kredit perbankan Maluku disebabkan peningkatan kredit konsumtif dan kredit modal kerja. Sedangkan penurunan kredit dari



perbankan di luar Maluku disebabkan penurunan kredit modal kerja dan investasi. Penurunan kredit dari perbankan di luar Maluku dapat disebabkan rendahnya atau tidak adanya realisasi kredit investasi/modal kerja baru, dan masih berupa kredit lama terutama berupa kredit investasi yang berjangka waktu lama.

Grafik 25. Perbandingan Perkembangan Kredit dari Perbankan Di Maluku dan Perbankan di luar Maluku



2.4.1. Realisasi Kredit Baru Bank Umum (data LBU)

Pada triwulan laporan outstanding/baki debit kredit yang disalurkan oleh bank umum di Maluku sebesar Rp. 983,86 Miliar. Dilihat mutasinya, maka terdapat mutasi debit berupa persetujuan kredit baru sebesar Rp. Rp. 156,7 Miliar (akumulasi bulan Juli, Agustus dan September) yang menambah baki debit triwulan II 2006 dan terdapat mutasi kredit (dapat berupa pelunasan kredit) selama bulan Juli, Agustus dan September sebesar Rp. 78,32 Miliar yang mengurangi baki debit triwulan II 2006. Dengan demikian pada triwulan laporan terdapat mutasi net/bersih sebesar Rp 78.42 Miliar.

**Tabel 21. Mutasi Baki Debet Kredit Triwulan III 2006
berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum**

Baki Debet Trw. II 2006	Mutasi			Baki Debet Trw. III 2006
	Debet	Kredit	Net	
905.44	156.75	78.32	78.42	983.86

Realisasi kredit tersebut merupakan 68,39% dari persetujuan kredit baru pada triwulan III 2006 sebesar Rp. 229,2 Miliar.

2.4.2. Penyaluran Kredit Bank Umum⁵ Berdasarkan LBU per Sektor Ekonomi & Wilayah Bank Pelapor

Berdasarkan data laporan bank umum, secara total kredit yang disalurkan oleh bank umum di wilayah Ambon sebesar 60,33% dari total kredit bank umum di provinsi Maluku. 69% dari total kredit disalurkan ke sektor lain-lain yang bersifat konsumtif sedangkan sisanya sebesar 31% dibagi ke 9 sektor lainnya.

**Tabel 22. Kredit Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi
dan Wilayah Bank Pelapor LBU**

Juta Rp.

Wilayah Bank Pelapor Sektor Ekonomi	Wilayah Ambon ¹⁾			Wilayah Maluku Tengah ²⁾			Wilayah Maluku Tenggara ³⁾			Total	
	Nominal	% sektor thdp sektor lain	% sektor thdp Total Kredit	Nominal	% sektor thdp sektor lain	% sektor thdp Total Kredit	Nominal	% sektor thdp sektor lain	% sektor thdp Total Kredit	Nominal	% sektor thdp Total Kredit
	1 Pertanian	6,124	1.03	0.62	1,263	0.66	0.13	274	0.14	0.03	7,661
2 Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3 Industri	1,931	0.33	0.20	244	0.13	0.02	-	-	-	2,175	0.22%
4 Listrik, Gas & Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5 Konstruksi	64,831	10.92	6.59	8,632	4.50	0.88	9,802	4.94	1.00	83,265	8.46%
6 Perdag./Hotel/Rest	125,126	21.08	12.72	24,569	12.81	2.50	32,031	16.14	3.26	181,726	18.47%
7 Pengangkutan dll	10,351	1.74	1.05	643	0.34	0.07	888	0.45	0.09	11,882	1.21%
8 Jasa Dunia Usaha	7,477	1.26	0.76	951	0.50	0.10	110	0.06	0.01	8,538	0.87%
9 Jasa Sosial Masy.	7,991	1.35	0.81	141	0.07	0.01	-	-	-	8,132	0.83%
10 Lain-lain	369,716	62.29	37.58	155,402	81.00	15.80	155,366	78.28	15.79	680,484	69.16%
Total	593,547	100.0	60.33	191,845	100.0	19.50	198,471	100.0	20.17	983,863	100.00%

Keterangan :

- 1) Adalah wilayah Kodya Ambon
- 2) Terdiri dari Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru, Kab. SBB, Kab. SBT
- 3) Terdiri dari Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kep. Aru dan Kab. MTB

⁵ Tidak termasuk data BPR

Dominasi penyaluran kredit ke sektor lain-lain/konsumtif terjadi di semua wilayah. Walaupun wilayah di luar Ambon lebih luas wilayah pertaniannya (termasuk perikanan) dibanding wilayah Ambon, namun kredit pertanian (termasuk perikanan) justru tertinggi disalurkan oleh perbankan di wilayah Ambon yaitu sebesar 0,62% dari total kredit, sedangkan wilayah maluku tengah dan tenggara masing-masing 0,13% dan 0,03%.

2.4.3. Kredit Bank Umum Menurut Skala Usaha

Menurut besarnya plafond kredit, pada triwulan laporan kredit bank umum di Provinsi Maluku didominasi oleh kredit UMKM (Plafond dibawah 5 Miliar termasuk kredit konsumtif) sebesar 97,75%, sisanya adalah kredit non UMKM (Plafond diatas 5 Miliar) sebesar 2.25%.

Kredit Non UMKM sebesar Rp. 22,1 Miliar, tersalur ke Sektor Lain-lain (sub sektor lain-lain lainnya).

Tabel 23. Kredit Bank Umum Berdasarkan Bank Pelapor Menurut Skala Usaha

Juta Rp.

SKALA USAHA	REKG	PLAFOND	BAKI DEBET		NPL		
			NOM	%	NOM	%	Share
A. KREDIT UMKM	50,471	1,100,100	961,734	97.75	34,193	3.56	100.00
1 KU. MIKRO (PLAF. RP. <50 JT)	48,483	598,813	568,169	57.75	16,109	1.64	47.11
2 KUK (PLAF. RP. 50 JT - 500 JT)	1,784	253,460	210,478	21.39	7,822	0.80	22.88
3 KU MENENGAH (PLAF. RP. 500 JT - 5 M)	204	247,827	183,087	18.61	10,262	1.04	30.01
B. KREDIT NON UMKM (PLAF. > 5 M)	3	22,129	22,129	2.25	-	-	-
TOTAL	50,474	1,122,229	983,863	100.00	34,193	3.48	100.00

Kredit usaha mikro mendominasi kredit UMKM sebesar Rp. 568,2 Miliar (57,75%) dengan jumlah rekening sebanyak 48.483. Namun besarnya pangsa tersebut diikuti dengan NPLs tertinggi sebesar 1,64%. Untuk Kredit Usaha Menengah walaupun pangasanya dibawah Kredit Usaha Kecil namun NPLs-nya merupakan urutan kedua sebesar 1,04%. Sedangkan kredit Non UMKM tidak terdapat kredit bermasalah.

2.5. Loan to Deposit Ratio (LDR)

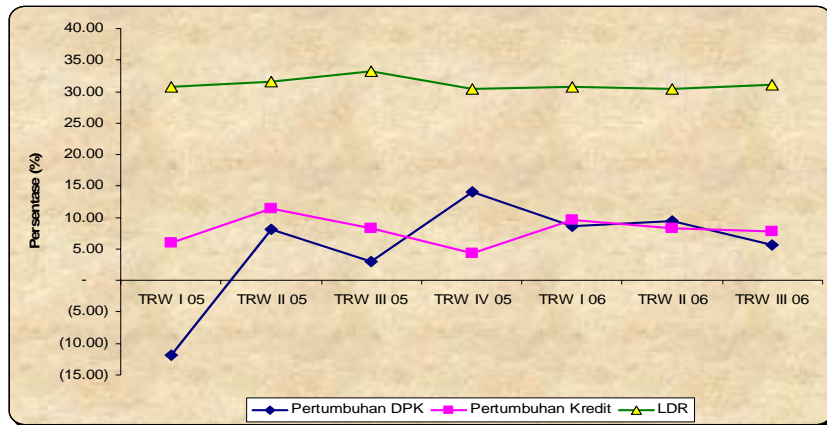
Perbandingan antara dana yang dihimpun (DPK) dengan kredit yang disalurkan (Loan to Deposit ratio/LDR) selama dua tahun terakhir cenderung fluktuatif dan berkisar antara 30-33% dengan rata-rata sebesar 31%. Dibandingkan triwulan sebelumnya (triwulanan) terjadi peningkatan LDR yang disebabkan pertumbuhan kredit lebih tinggi dibandingkan DPK, sedangkan dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya (tahunan) terjadi penurunan LDR yang disebabkan pertumbuhan DPK lebih tinggi dibandingkan kredit

Tabel 24. LDR Perbankan

Keterangan	2004	Milyar Rupiah								
		2005				2006			Pertumbuhan (%)	
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III	q-t-q	y-o-y
DPK	2,493.23	2,198.08	2,377.98	2,451.13	2,793.99	3,033.53	3,317.92	3,506.06	5.67	43.04
KREDIT	637.28	675.41	752.57	814.70	849.47	930.76	1,007.89	1,087.13	7.86	33.44
LDR (%)	0.26	0.31	0.32	0.33	0.30	0.31	0.30	0.31	2.07	(6.71)

Fluktuatifnya LDR disebabkan fluktuatifnya pertumbuhan DPK. Dengan demikian LDR sangat dipengaruhi oleh turun naiknya DPK.

Grafik 26. LDR, Pertumbuhan DPK dan Kredit



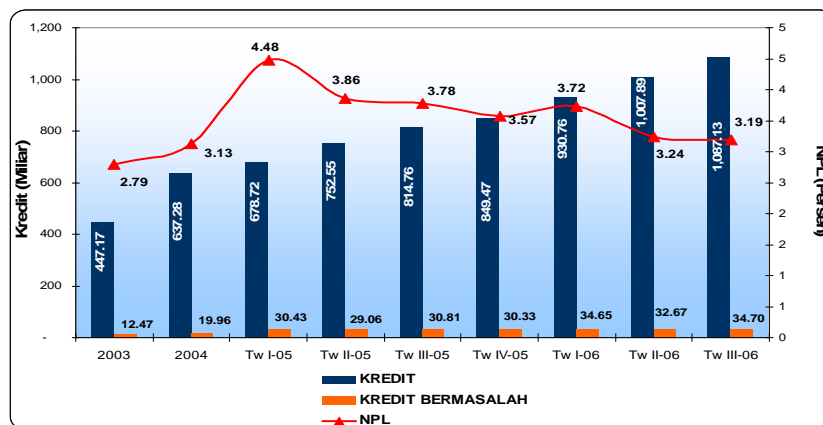
Berdasarkan data LBU turun naiknya DPK sangat dipengaruhi oleh turun naiknya dana yang bersumber dari pemda yang umumnya berbentuk giro. Sedangkan DPK yang bersumber dari perorangan cenderung stabil. Selanjutnya kalau dilihat grafik Pangsa DPK perjenis Deposita, pada pembahasan DPK sebelumnya, terlihat bahwa

pangsa DPK perorangan menurun dari sekitar 70% menjadi 60%, sedangkan pangsa DPK pemda meningkat dari sekitar 20% menjadi 30%. Hal ini mengindikasikan masuknya/belum terealisirnya dana-dana APBD pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota). Rendahnya realisasi dana APBD disebabkan terjadinya perubahan ketentuan-ketentuan pengelolaan anggaran dimana pelaksana mengalami kesulitan memahaminya. Sebab lain adalah keterbatasan SDM terutama di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan. Juga disinyalir petugas di Pemda takut menangani proyek-proyek pengadaan barang karena khawatir menyalahi aturan. Sebagaimana diketahui dewasa ini sedang gencar dikampanyekan pemberantasan korupsi.

2.6. Kredit Bermasalah/Non Performing Loans Bank Umum

Perkembangan kredit bermasalah di maluku, berdasarkan laporan bank umum (LBU), jauh dibawah batas NPL nasional sebesar 5% dan trendnya terus menurun. Pada triwulan laporan kredit bermasalah bank umum di Provinsi Maluku sebesar 3,19%.

Grafik 27. NPL's Bank Umum



Dilihat persubsektor ekonomi dimana pada triwulan laporan kredit bank umum di Provinsi Maluku disalurkan ke 26 sub sektor ekonomi, kredit bermasalah tertinggi terjadi di sub sektor jasa-jasa sosial/masyarakat lainnya sebesar 47.27% dengan pangsa terhadap NPLs keseluruhan sebesar 11%. Kredit bermasalah yang cukup tinggi (berkisar antara 13-17.78%) terjadi di subsektor Jalan raya & Jembatan, Restoran & Hotel, Pertanian tanaman pangan, Jasa-jasa dunia usaha lainnya.

**Tabel 25. Kredit Bank Umum Berdasarkan LBU
per Sub Sektor Ekonomi**

RANK	SUB SEKTOR	SEKTOR	BAKI DEBET	PANGSA	NPL'S		
					NOMINAL	%	PANGSA
1	Lain-lain - lainnya	Lain-lain	443.420.00	45.069%	6.739.00	1.52%	19.7%
2	Lain-lain - Perumahan	Lain-lain	237.064.00	24.095%	5.834.00	2.46%	17.1%
3	Perdagangan eceran	Perdag./Hotel/Rest	99.038.00	10.066%	6.055.00	6.11%	17.7%
4	Konstruksi - lainnya	Konstruksi	73.960.00	7.517%	4.553.00	6.16%	13.3%
5	Perdagangan, restoran dan hotel lainnya	Perdag./Hotel/Rest	51.627.00	5.247%	1.401.00	2.71%	4.1%
6	Distribusi	Perdag./Hotel/Rest	19.586.00	1.991%	807.00	4.12%	2.4%
7	Pengangkutan umum	Pengangkutan dll	11.755.00	1.195%	1.210.00	10.29%	3.5%
8	Jalan raya dan jembatan	Konstruksi	8.190.00	0.832%	1.456.00	17.78%	4.3%
9	Jasa-jasa sosial/masyarakat lainnya	Jasa Sosial Masy.	7.984.00	0.811%	3.774.00	47.27%	11.0%
10	Jasa-jasa dunia usaha lainnya	Jasa Dunia Usaha	7.838.00	0.797%	1.046.00	13.35%	3.1%
11	Pertanian - Perikanan	Pertanian	6.175.00	0.628%	-	0.00%	0.0%
12	Restoran dan hotel	Perdag./Hotel/Rest	5.968.00	0.607%	1.033.00	17.31%	3.0%
13	Pembelian dan pengumpulan barang dagangan dalam negeri	Perdag./Hotel/Rest	5.507.00	0.560%	206.00	3.74%	0.6%
14	Industri pengolahan lainnya	Industri	1.432.00	0.146%	47.00	3.28%	0.1%
15	Perumahan sederhana	Konstruksi	1.115.00	0.113%	-	0.00%	0.0%
16	Pertanian - Peternakan	Pertanian	881.00	0.090%	-	0.00%	0.0%
17	Industri pengolahan hasil tambang bukan	Industri	538.00	0.055%	-	0.00%	0.0%
18	Real estate - Lainnya	Jasa Dunia Usaha	450.00	0.046%	-	0.00%	0.0%
19	Real estate - Perumahan sederhana	Jasa Dunia Usaha	250.00	0.025%	-	0.00%	0.0%
20	Sarana Pertanian	Pertanian	230.00	0.023%	-	0.00%	0.0%
21	Pertanian - Tanaman Pangan	Pertanian	228.00	0.023%	32.00	14.04%	0.1%
22	Industri makanan, minuman, dan tembakau	Industri	205.00	0.021%	-	0.00%	0.0%
23	Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian- Lainnya	Pertanian	147.00	0.015%	-	0.00%	0.0%
24	Kesehatan	Jasa Sosial Masy.	134.00	0.014%	-	0.00%	0.0%
25	Biro Perjalanan	Jasa-jasa sosial Masy.	127.00	0.013%	-	0.00%	0.0%
26	Pendidikan	Jasa-jasa sosial Masy.	14.00	0.001%	-	0.00%	0.0%
TOTAL			983,863.00	100.000%	34,193.00	3.48%	100.00%

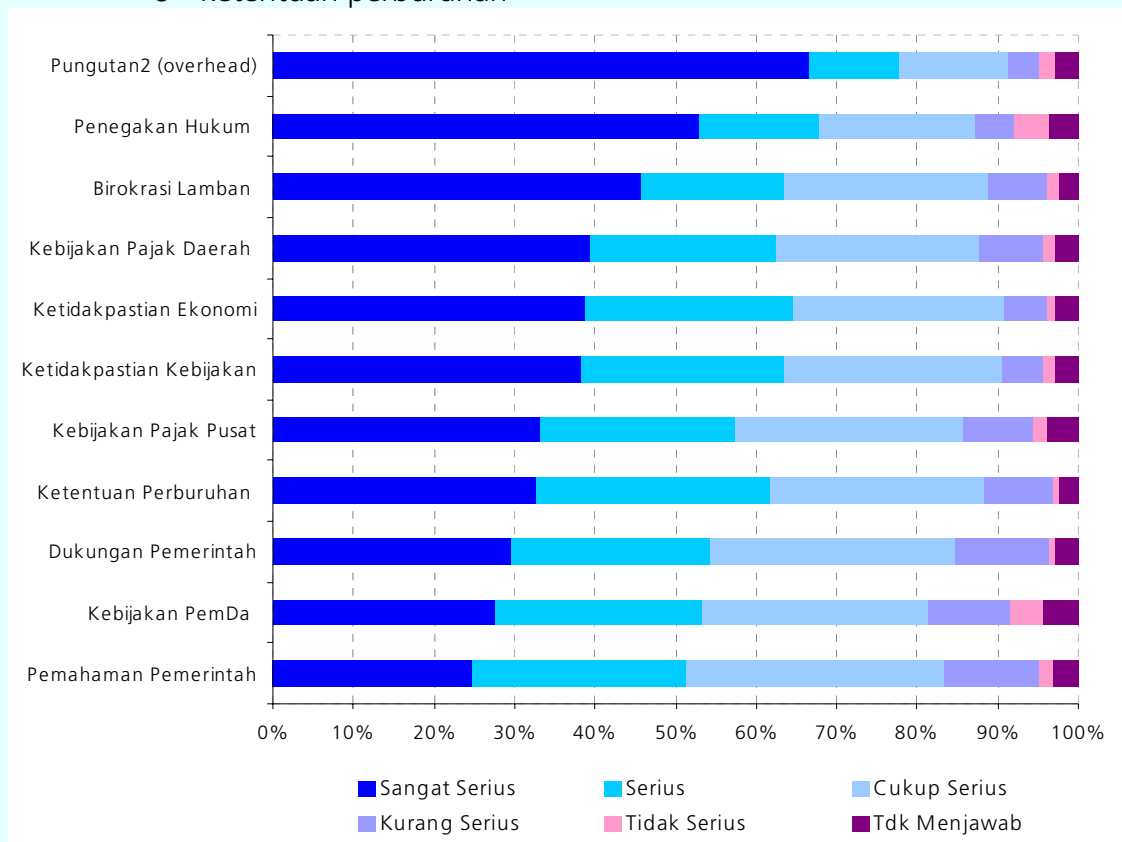


Box 3

SURVEI PEMETAAN EKONOMI BANK INDONESIA

Permasalahan paling serius dalam pelaksanaan kegiatan investasi, terkait dengan peran Pemerintah:

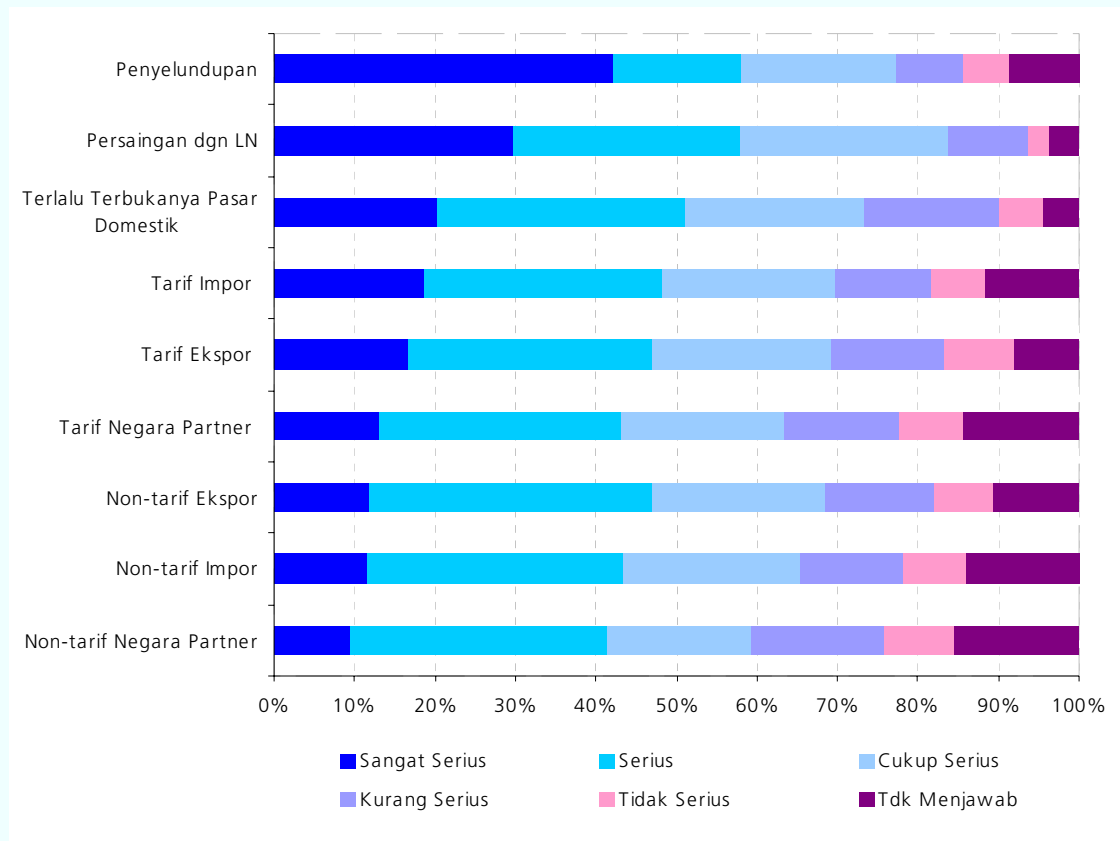
- Banyaknya pungutan-pungutan tidak resmi (70% responden) dan lemahnya penegakan hukum (60% responden)
- Faktor lainnya yg tergolong serius:
 - birokrasi yang lamban
 - kebijakan pajak
 - ketentuan perburuhan





Permasalahan serius terkait dengan daya saing perdagangan internasional: Sebagian besar responden (>50%) menganggap masalah yang tergolong serius adalah :

- o penyelundupan,
- o persaingan dengan usaha sejenis di luar negeri,
- o terlalu terbukanya pasar domestik dan kebijakan tarif.





BAGIAN III

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN REGIONAL



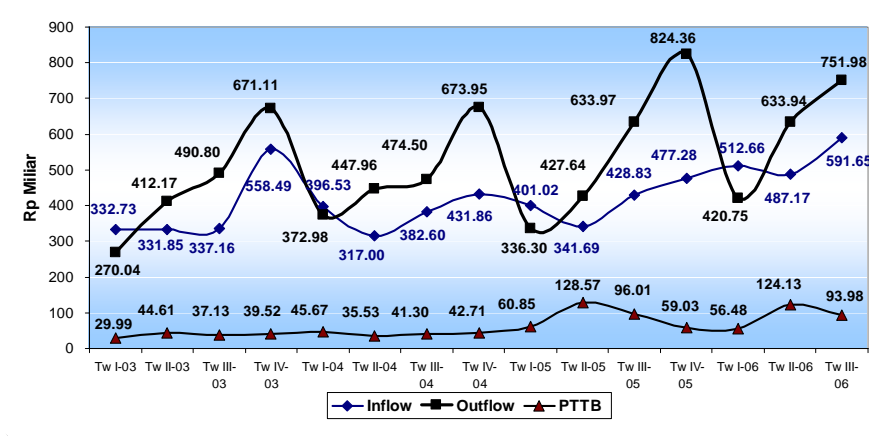
3.1. Perputaran Uang

Kelancaran dan keamanan yang merupakan tolok ukur utama kinerja Sistem Pembayaran (*payment system*) yang diselenggarakan, pada periode laporan dapat tercapai. Kondisi tersebut dapat terlihat pada jenis media transaksi pembayaran yang digunakan, baik berupa transaksi tunai (dengan uang kartal) dan transaksi non tunai (kliring dan RTGS).

Pada umumnya, Kantor Bank Indonesia (Ambon) mempunyai karakteristik kas bersifat *net-outflow* (uang keluar lebih banyak daripada uang masuk). Kondisi perekonomian Maluku yang terus membaik dapat dilihat dari berbagai indikator perputaran uang baik tunai maupun non tunai yang terus meningkat. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan instrumen pembayaran non tunai juga mulai meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan adanya peningkatan signifikan pada jumlah RTGS.

Bank Indonesia selaku otoritas moneter bertugas menjaga kesediaan uang dimasyarakat dalam kondisi layak edar. Setiap harinya Bank Indonesia menerima uang masuk (*inflow*) dari masyarakat dan mengeluarkan uang (*outflow*) kepada masyarakat baik melalui perbankan atau pertukaran secara langsung kepada masyarakat. Uang yang masuk dalam kondisi rusak/lusuh ke Bank Indonesia atau biasa disebut PTTB (*Pemberian Tanda Tidak Berharga*) selalu dimusnahkan oleh Bank Indonesia. Berikut perkembangan perputaran uang melalui Bank Indonesia baik *Inflow*, *Outflow* maupun PTTB di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Ambon.

Grafik 28. Perkembangan Perputaran Uang Regional



3.1.1. Inflow (Uang Masuk)

Jumlah uang masuk ke Bank Indonesia Ambon selama Triwulan III tahun 2006 tercatat sebanyak Rp 591,65 Miliar, jumlah ini meningkat secara tahunan sebesar 37,97% dimana selama Triwulan III tahun 2005 tercatat jumlah uang masuk sebanyak Rp 428,83 Miliar. Seperti halnya siklus tahun-tahun sebelumnya maka inflow di triwulan III mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I dan II disebabkan karena meningkatnya perputaran uang tunai sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat.

3.1.2. Outflow (Uang Keluar)

Jumlah uang keluar dari Bank Indonesia Ambon selama Triwulan III tahun 2006 tercatat sebanyak Rp 751,98 Miliar, jumlah ini meningkat sebesar 18,61% dibanding tahun sebelumnya, dimana selama Triwulan III tahun 2005 tercatat jumlah uang keluar hanya sebanyak Rp 633,97 Miliar. Jika diperhatikan net outflow (outflow – inflow) akan bernilai positif atau jumlah outflow lebih besar dibanding jumlah inflow pada setiap triwulan III, III dan IV. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai meningkat sesuai dengan dinamika pergerakan ekonomi. Dengan kondisi tersebut berarti terjadi korelasi yang positif antara jumlah outflow uang kartal dengan tingkat konsumsi masyarakat di wilayah kerja Bank Indonesia Ambon.

3.1.3. PTTB (Uang Rusak/Lusuh)

Di antara aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia Ambon (inflow) pada Triwulan III tahun 2006 tersebut, tercatat sebesar Rp 93,98 Miliar dikategorikan sebagai uang lusuh/rusak dan dikenakan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB). Nilai ini secara tahunan terjadi penurunan sebesar 2,11% dibanding pada triwulan III tahun 2005 yang tercatat sebesar Rp96,01 Miliar.

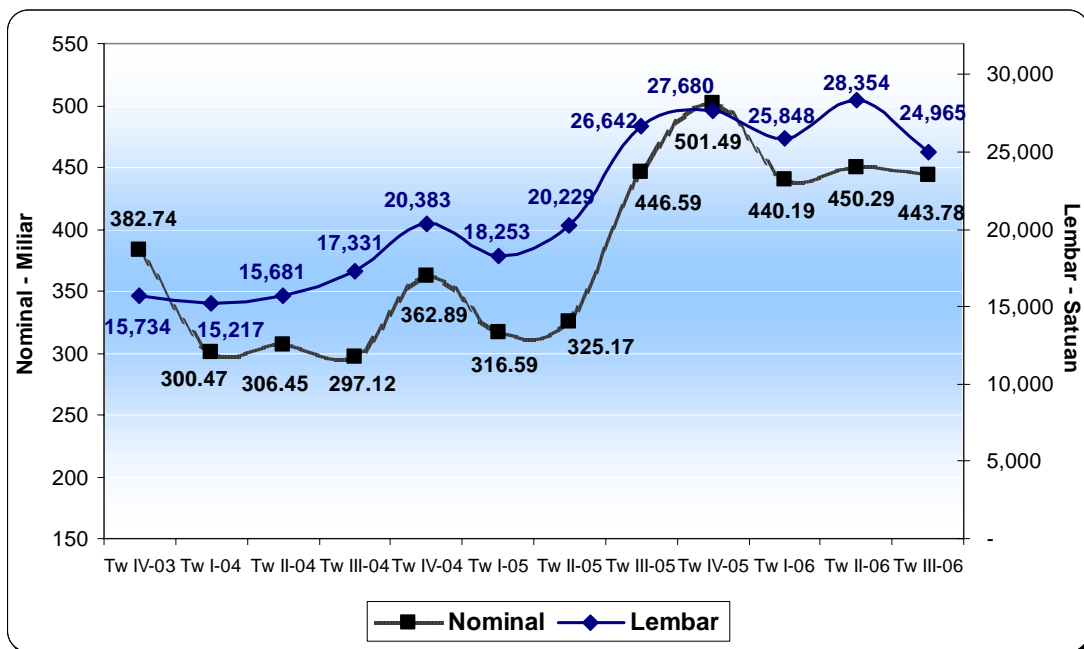
Secara persentase, jumlah uang lusuh/rusak (PTTB) dibandingkan uang yang masuk (inflow) ke Bank Indonesia Ambon pada Triwulan III tahun 2006 sebesar 15,88% terjadi penurunan dibanding selama triwulan III tahun 2005 sebesar 22,39%. Jika diamati trend dari persentase uang lusuh yang masuk maka dapat disimpulkan bahwa

jumlah uang lusuh selama triwulan I cukup kecil lalu meningkat pada triwulan II dan kemudian menurun kembali pada triwulan III dan IV.

3.2. Perputaran Kliring

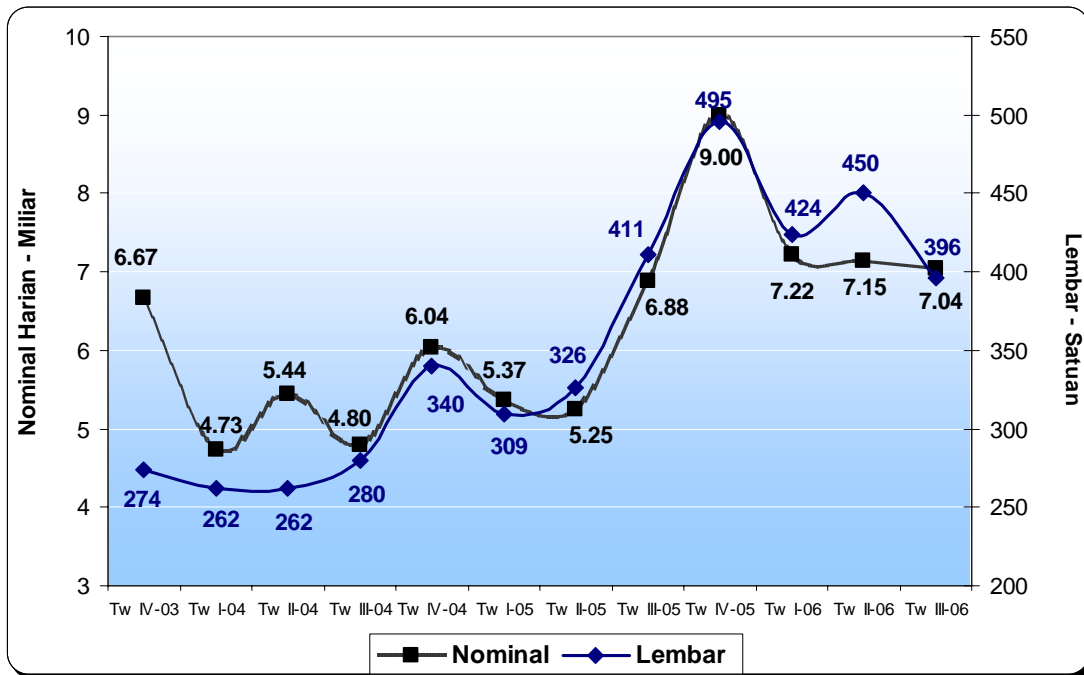
Jumlah peserta kliring di wilayah kliring Maluku hingga akhir triwulan III tahun 2006 tercatat sebanyak 11 kantor, mengalami perubahan 1 peserta yaitu PT. Bank Tabungan Negara.

Grafik 29. Perkembangan Perputaran Kliring Regional



Perputaran kliring selama Triwulan III tahun 2006 tercatat sebanyak 24.965 lembar, jumlah ini berkurang sebesar 6,29% dibanding tahun sebelumnya dimana selama Triwulan III tahun 2005 tercatat terjadi perputaran kliring sebanyak 26.642 lembar. Secara nominal, perputaran kliring di wilayah kliring Maluku selama Triwulan III tahun 2006 tercatat sebesar Rp 443,78 Miliar, berkurang sebesar 0,63% dibandingkan perputaran kliring selama Triwulan III tahun 2005 yang tercatat sebesar Rp 446,59 Miliar.

Grafik 30. Perkembangan Rata-rata Harian Perputaran Kliring Regional

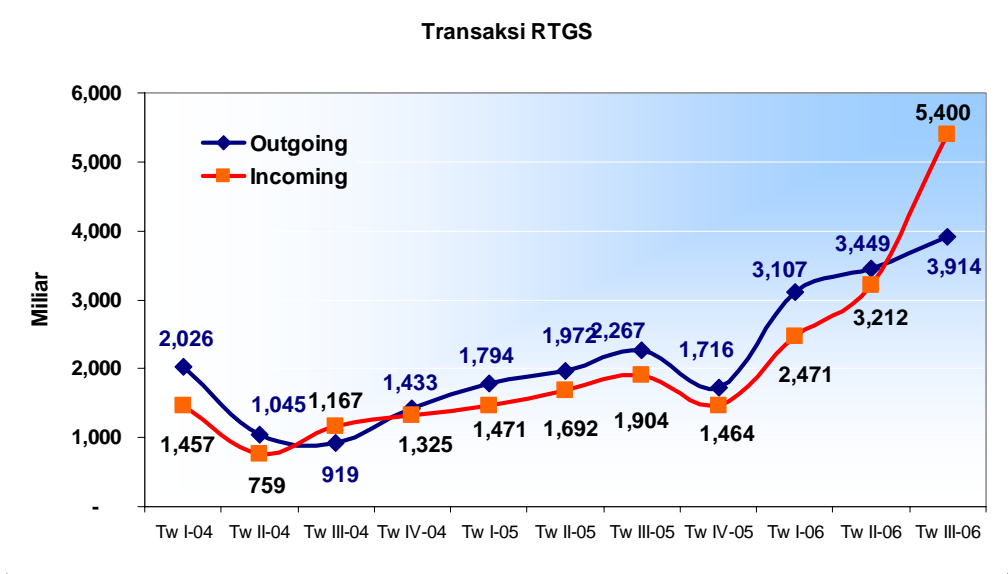


Jika dirata-rata perputaran kliring per hari, jumlah transaksi secara tahunan menurun 3,58% dari sebelumnya tercatat rata-rata sebanyak 411 lembar per hari pada Triwulan III tahun 2005 menjadi rata-rata perhari sebanyak 396 lembar pada triwulan III tahun 2006. Secara nominal, rata-rata per hari perputaran kliring di wilayah kliring Maluku tercatat sebesar Rp 7,04 Miliar per hari pada Triwulan III tahun 2006 meningkat sebesar 2,39% dibandingkan rata-rata per hari perputaran kliring pada triwulan III tahun 2005 yang hanya mencapai rata-rata Rp 6,88 Miliar per hari.

3.3. Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement)

Transaksi non tunai melalui RTGS yang sifatnya seketika (*real time*) cenderung mengalami peningkatan. Pada Triwulan III tahun 2006 tercatat transaksi RTGS melalui Kantor Bank Indonesia Ambon sebesar Rp 3.914 Miliar untuk *Outgoing* dan Rp 5.400 Miliar untuk *Incoming*.

Grafik 31. Perkembangan Transaksi RTGS Bank Indonesia Ambon



Jumlah outgoing tersebut secara tahunan meningkat sebesar 72,65% dibanding transaksi outgoing RTGS selama Triwulan III tahun 2005 yang tercatat sebesar Rp 2.267 Miliar. Jumlah transaksi incoming RTGS di Maluku meningkat secara tahunan sebesar 183,68% dibanding transaksi incoming RTGS selama Triwulan III tahun 2005 yang tercatat sebesar Rp 1.904 Miliar. Dari peta transaksi RTGS menunjukkan masih adanya tingkat ketergantungan ekonomi Maluku terhadap daerah lain khususnya Jakarta baik untuk transaksi incoming maupun outgoing. Untuk lebih memberikan gambaran peta transaksi dana melalui RTGS baik incoming maupun outgoing dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26. Peta Transaksi RTGS Incoming⁶ (Rp Miliar)

No	Daerah Asal	Transaksi RTGS Incoming	
		Nominal	Pangsa
1	AMBON	1,612.07	29.85%
2	BANDA ACEH	0.01	0.00%
3	BATAM	0.85	0.02%
4	DENPASAR	1.01	0.02%
5	JAKARTA	3,747.11	69.39%
6	JAMBI	0.10	0.00%
7	JAYAPURA	3.37	0.06%
8	JEMBER	0.59	0.01%
9	KENDARI	0.17	0.00%
10	KUPANG	0.03	0.00%
11	MAKASSAR	3.40	0.06%
12	MANADO	0.00	0.00%
13	MEDAN	0.44	0.01%
14	PALU	0.00	0.00%
15	PEKANBARU	1.00	0.02%
16	SEMARANG	0.11	0.00%
17	SURABAYA	6.30	0.12%
18	TERNATE	23.76	0.44%
19	YOGYAKARTA	0.05	0.00%
	TOTAL	5,400.35	100.00%

Sumber : Bank Indonesia –DASP

⁶ Seluruh transaksi RTGS dari daerah asal yang masuk ke Ambon

Tabel 27. Peta Transaksi RTGS Outgoing⁷ (Rp Miliar)

No	Daerah Tujuan	Transaksi RTGS Outgoing	
		Nominal	Pangsa
1	ACEH	0.00	0.00%
2	AMBON	1,612.07	41.18%
3	DENPASAR	0.21	0.01%
4	JAKARTA	113.53	2.90%
5	JAMBI	0.20	0.01%
6	KUPANG	0.16	0.00%
7	MAKASSAR	8.41	0.21%
8	MEDAN	0.12	0.00%
9	OTHER	2,145.53	54.81%
10	SAMARINDA	0.03	0.00%
11	SURABAYA	32.77	0.84%
12	TERNATE	1.39	0.04%
13	YOGYAKARTA	0.07	0.00%
	TOTAL	3,914.48	100.00%

Sumber : Bank Indonesia –DASP

Kondisi ketergantungan tersebut yang tercermin oleh arus uang yang salah satu indikatornya dari data RTGS yang ternyata di wilayah kerja BI Ambon terjadi net outgoing atau jumlah transfer keluar lebih banyak dibanding transfer masuk. Sebaliknya dari data arus barang di pelabuhan dan Bandara Pattimura menunjukkan bahwa jumlah barang yang masuk ke Maluku lebih banyak dibanding yang keluar Maluku (barang yang masuk sekitar 15% dibanding barang yang keluar Maluku). Dengan demikian salah satu penggunaan transfer dana keluar Maluku tersebut adalah untuk membayar impor barang-barang dari daerah lain.

⁷ Seluruh transaksi RTGS dari Ambon yang keluar ke daerah tujuan



BAGIAN IV
PROSPEK EKONOMI REGIONAL

4.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Maluku pada triwulan mendatang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan bahkan lebih tinggi dibanding triwulan laporan. Membaiknya faktor cuaca/musim dan perkembangan indikator-indikator ekonomi baik pada periode laporan maupun periode-periode mendatang, diperkirakan akan menjadikan pertumbuhan ekonomi Maluku yang lebih tinggi. Kondisi tersebut didukung oleh membaiknya indikator ekonomi makro dimana nilai tukar rupiah mulai menguat dan stabil, penurunan tingkat suku bunga serta inflasi yang rendah. Semakin kondusifnya Maluku untuk berinvestasi dan berbisnis yang ditunjukkan dengan banyak masuknya pelaku bisnis baru yang mulai mengincar pasar Maluku juga turut mendukung perkembangan ekonomi. Konsumsi pemerintah dan masyarakat yang meningkat makin memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi di periode mendatang.

Dari **sisi permintaan/pengeluaran**, diproyeksikan sumber pendorong pertumbuhan di periode mendatang adalah konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang terus memberikan kontribusi utama pertumbuhan ekonomi di Maluku. Kondisi Maluku yang masih sulit untuk menghadirkan investor besar kiranya perlu dirangsang dengan adanya keberanian investasi oleh pemerintah daerah Maluku sendiri dengan terus melanjutkan pembangunan berbagai fasilitas pendukung investasi khususnya transportasi dan komunikasi. Sedangkan dari **sisi penawaran/produksi**, sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor pertanian khususnya sub sektor perikanan akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Maluku di triwulan mendatang.

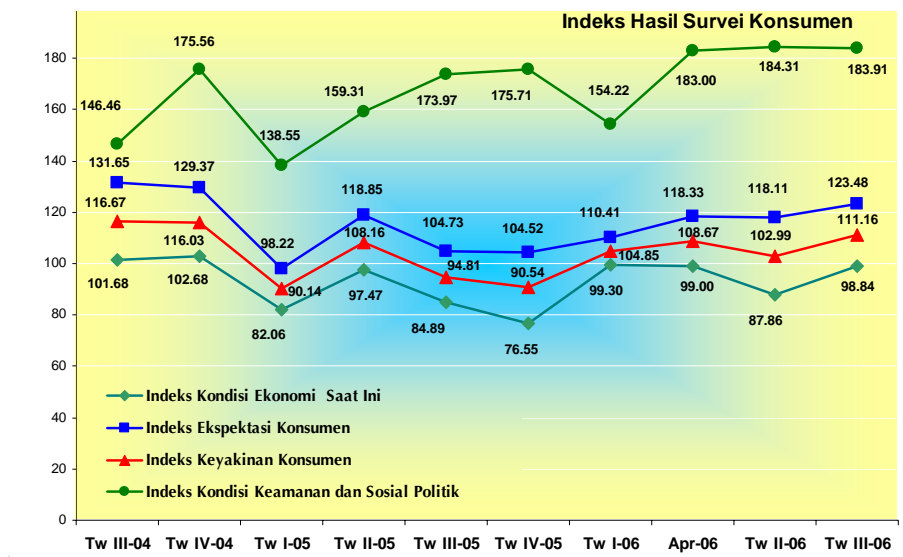
Selanjutnya, perbaikan kinerja perekonomian daerah tersebut juga didukung oleh peranan perbankan sebagai lembaga intermediasi yang diperkirakan juga akan terus membaik. Sesuai dengan pangsaanya, orientasi penyaluran kredit perbankan masih difokuskan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan sektor unggulan daerah. Meskipun berdasarkan jenis penggunaannya, jenis konsumsi masih menjadi favorit perbankan dalam penyaluran kredit mempertimbangkan risiko yang relatif kecil.

Kondisi geografis Maluku yang berbentuk kepulauan masih menjadikan fokus pembangunan daerah terhadap infrastruktur yang mempunyai peranan yang sangat strategis dan urgen. Terbatasnya infrastruktur yang dimiliki membawa dampak pada

kinerja ekonomi yang belum merata dan belum mencapai pada kapasitas optimalnya. Pembangunan proyek tersebut bukan hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku ke level yang lebih tinggi, namun juga secara langsung akan berimplikasi pada peningkatan lapangan kerja dan pendapatan perkapita masyarakat, yang pada gilirannya mampu mengurangi angka kemiskinan di daerah.

Selanjutnya, hasil kajian di atas akan dibandingkan pula dengan hasil survei konsumen yang dilakukan di Kota Ambon, yang pada dasarnya mengukur ekspektasi masyarakat terhadap sejumlah indikator perkembangan ekonomi dalam periode 3-6 bulan mendatang. Optimisme terhadap kondisi perekonomian mendatang juga ditunjukkan oleh hasil survei konsumen yang menunjukkan optimisme masyarakat baik dari indeks keyakinan konsumen maupun indeks kondisi keamanan sosial dan politik. Hal tersebut dapat dilihat pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 111,16 (Optimis : > 100) pada periode laporan. Indikator lainnya yang mengukur persepsi masyarakat terhadap kondisi keamanan dan sosial politik yang menghasilkan indeks 183,91 (sangat optimis : > 100). Satu hal yang perlu dicatat adalah sejak dilaksanakannya survei konsumen di Kota Ambon pada triwulan III 2004 ternyata masyarakat Kota Ambon telah optimis bahwa keamanan di Maluku khususnya Kota Ambon akan terus membaik dan kondusif bagi pergerakan perekonomian.

Grafik 32. Indeks Hasil Survei Konsumen

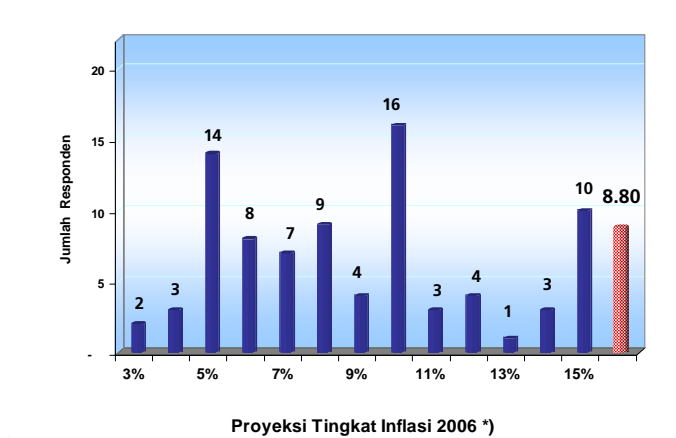


4.2. Prospek Inflasi

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Oktober 2005 menyebabkan inflasi tahunan Kota Ambon melambung hingga mencapai 16,67% (y-o-y) pada akhir tahun 2005 dan turun menjadi 15,26% (y-o-y) pada triwulan III tahun 2006. Pada periode mendatang diproyeksikan laju inflasi akan terus mengalami tekanan sejalan dengan datangnya perayaan hari raya idul fitri dan natal serta tahun baru. Meskipun demikian genap setahunnya kenaikan BBM pada bulan Oktober 2006 akan mengembalikan laju inflasi baik nasional maupun regional pada level *single digit*.

Meskipun laju inflasi secara nasional diperkirakan berada pada level $8 \pm 1 \%$, namun kalangan dunia usaha di Maluku memperkirakan laju inflasi tahun 2006 sebesar **8,80%** tepat berada di kisaran proyeksi nasional. Hal ini tercermin pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha pada triwulan III tahun 2006 yang memiliki ekspektasi lebih positif dibanding pada hasil survei periode sebelumnya yang menghasilkan nilai proyeksi sebesar 9,16%.

Grafik 33. Proyeksi Inflasi 2006 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha



4.3. Prospek Perbankan dan Sistem Pembayaran

Penurunan BI Rate secara nasional diharapkan secara regional dapat direspon positif baik oleh kalangan perbankan maupun dunia usaha. Akumulasi dana masyarakat yang cukup besar di perbankan khususnya yang berasal dari dana pemerintah diperkirakan akan dapat dicairkan pada triwulan mendatang. Penyaluran kredit perbankan yang terus meningkat diperkirakan juga akan terus meningkat bahkan



pertumbuhan kredit perbankan akan lebih tinggi ditriwulan mendatang. Kegiatan perekonomian yang terus meningkat diperkirakan juga akan terus meramaikan transaksi pembayaran di Maluku baik melalui proses kliring maupun RTGS.

Dengan menurunnya suku bunga tersebut, diharapkan mampu mendorong percepatan penyaluran kredit kepada masyarakat khususnya pada sektor yang produktif. Penyaluran kredit modal kerja yang relatif mengalami pertumbuhan kurang menggembirakan diperkirakan akan meningkat secara signifikan pada triwulan mendatang.

4.4. Faktor Risiko

Meskipun terdapat optimisme yang lebih besar terhadap perbaikan kinerja ekonomi pada saat mendatang, berbagai **risiko tetap harus diwaspadai**. Pertama, terganggunya stok produksi didaerah lain seperti Sulawesi dan Jawa akibat datangnya musim penghujan yang dapat menimbulkan dampak kurangnya barang-barang impor dari daerah tersebut seperti beras, sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Kedua, faktor musim hari raya dan permasalahan infrastruktur, khususnya prasarana transportasi perlu diantisipasi untuk mencegah kenaikan harga khususnya kelompok makanan. Ketiga, adanya berbagai kendala dalam penyaluran anggaran untuk belanja modal pemerintah dan implementasi kebijakan pemerintah dalam perbaikan iklim investasi.

DATA PERBANKAN PROVINSI MALUKU

(Dalam Juta Rupiah)

	2003	2004	2005		2006			Y-O-Y	Y-T-D	PANGSA
	TRW IV	TRW IV	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III			
Jumlah Bank	11	12	12	12	12	12	12	-	-	
Jumlah Kantor **)	58	60	61	61	62	62	62	1.64	1.64	
ASSET (LBU)	2,711,575	3,012,204	3,009,044	3,525,352	4,022,670	4,853,167	4,740,652	57.55	34.47	
DPK Bank Pelapor	2,178,807	2,513,721	2,451,221	2,793,990	3,033,532	3,317,917	3,506,063	43.03	25.49	100.00
Giro	507,216	640,216	628,060	712,601	923,065	1,114,458	1,154,510	83.82	62.01	32.93
Deposito	561,941	534,934	728,222	759,014	958,288	1,007,610	1,317,085	80.86	73.53	37.57
Tabungan	1,109,650	1,338,571	1,094,940	1,322,375	1,152,179	1,195,849	1,034,468	(5.52)	(21.77)	29.51
Kredit Bank Pelapor	447,169	637,285	814,758	849,472	930,763	1,007,885	1,090,234	33.81	28.34	
Jenis Penggunaan Kredit	447,169	637,285	814,758	849,472	930,763	1,007,885	1,090,234	33.81	28.34	100.00
Investasi	18,800	23,282	34,859	32,341	43,762	45,250	42,959	23.24	32.83	3.94
Modal Kerja	78,792	133,926	165,660	196,556	174,193	227,753	263,765	59.22	34.19	24.19
Konsumsi	349,577	480,077	614,239	620,575	712,808	734,882	783,510	27.56	26.26	71.87
Kredit Sektoral	447,169	637,285	814,758	849,472	930,763	1,007,885	1,090,234	33.81	28.34	100.00
Pertanian	2,060	2,983	3,388	3,188	7,654	6,093	7,672	126.45	140.65	0.70
Pertambangan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Industri	757	1,894	2,525	2,439	2,336	2,478	2,175	(13.86)	(10.82)	0.20
Listrik, Gas & Air	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Konstruksi	15,255	19,294	46,568	37,708	34,226	64,913	83,265	78.80	120.82	7.64
Perdagangan	61,695	104,755	118,595	161,945	146,056	171,739	182,303	53.72	12.57	16.72
Angkutan	5,940	6,697	9,992	9,938	10,630	12,413	11,882	18.92	19.56	1.09
Jasa Dunia Usaha	3,163	9,515	8,058	4,638	5,100	6,113	8,538	5.96	84.09	0.78
Jasa Sosial	8,579	10,965	9,337	7,037	10,253	7,739	8,136	(12.86)	15.62	0.75
Lainnya	349,720	481,182	616,295	622,579	714,508	736,398	786,263	27.58	26.29	72.12
L D R (%)	20.52	25.35	33.24	30.40	30.68	30.38	31.10			
Nominal NPLs (gross) sektoral	12,469	19,838	30,487	30,330	34,648	32,670	34,698	13.81		
Pertanian	-	-	108	209	499	401	32	(70.37)	(84.69)	0.09
Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Industri	-	-	-	-	-	47	47			0.14
Listrik, Gas & Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Konstruksi	327	1,726	2,213	2,277	2,138	3,642	6,009	171.53	163.90	17.32
Perdagangan	8,933	8,381	10,536	13,954	13,321	10,574	9,502	(9.81)	(31.90)	27.38
Angkutan	41	344	555	607	613	652	1,210	118.02	99.34	3.49
Jasa Dunia Usaha	7	2	1,807	4	2	1,050	1,046	(42.11)	26,050.00	3.01
Jasa Sosial	452	4,572	3,470	3,054	3,085	3,291	3,774	8.76	23.58	10.88
Lainnya	2,709	4,813	11,798	10,225	14,943	13,013	13,078	10.85	27.90	37.69

**KREDIT BANK UMUM MENURUT SEKTOR EKONOMI
DAN SKALA USAHA
PROVINSI M A L U K U
POSISI SEPTEMBER 2006
(SUMBER : DATA LBU BI AMBON)**

JUTA RUPIAH

SEKTOR EKONOMI	REKENING	PLAFOND	TOTAL			
			BAKI DEBET		NPL	
			NOMINAL	%	NOMINAL	%
TOTAL	50,474	1,122,229	983,863	100.00	34,193	3.48
1 Pertanian	44	9,300	7,661	0.78	32	0.00
1.1 1110 Pertanian - Tanaman Pangan	19	241	228	0.02	32	0.00
1.2 1140 Pertanian - Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	-	-
1.3 1160 Pertanian - Perikanan	14	7,502	6,175	0.63	-	-
1.4 1170 Pertanian - Peternakan	4	1,003	881	0.09	-	-
1.5 1180 Kehutanan dan pematangan kayu (logging)	-	-	-	-	-	-
1.6 1200 Perburuan	-	-	-	-	-	-
1.7 1310 Sarana Pertanian	1	300	230	0.02	-	-
1.8 1390 Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian-Lainnya	6	254	147	0.01	-	-
2 Pertambangan	-	-	-	-	-	-
2.1 2100 Pertambangan - Minyak dan Gas bumi	-	-	-	-	-	-
2.2 2200 Pertambangan - Bijih logam	-	-	-	-	-	-
2.3 2300 Pertambangan - Batubara	-	-	-	-	-	-
2.4 2900 Pertambangan - Lainnya	-	-	-	-	-	-
3 Industri	24	2,305	2,175	0.22	47	0.00
3.1 3100 Industri makanan, minuman, dan tembakau	1	205	205	0.02	-	-
3.2 3200 Industri makanan ternak dan ikan	-	-	-	-	-	-
3.3 3300 Industri tekstil, sandang, dan kulit	-	-	-	-	-	-
3.4 3400 Industri kayu dan hasil-hasil kayu	-	-	-	-	-	-
3.5 3500 Industri bahan kertas(pulp), kertas, dan hasil-hasil kertas, percetakan dan penerbitan	-	-	-	-	-	-
3.6 3600 Industri pengolahan bahan kimia dan hasil kimia, minyak bumi, batubara, karet, dan plastik	-	-	-	-	-	-
3.7 3700 Industri pengolahan hasil tambang bukan logam, selain hasil minyak bumi, dan batubara	2	550	538	0.05	-	-
3.8 3990 Industri pengolahan lainnya	21	1,550	1,432	0.15	47	0.00
4 Listrik, Gas & Air	-	-	-	-	-	-
4.1 4100 Listrik	-	-	-	-	-	-
4.2 4200 Gas	-	-	-	-	-	-
4.3 4300 Air	-	-	-	-	-	-
5 Konstruksi	240	106,112	83,265	8.46	6,009	0.61
5.1 5100 Perumahan sederhana	6	2,162	1,115	0.11	-	-
5.2 5300 Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT)	-	-	-	-	-	-
5.3 5500 Jalan raya dan jembatan	30	8,334	8,190	0.83	1,456	0.15
5.4 5800 Listrik	-	-	-	-	-	-
5.5 5900 Proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari/untuk pembayaran di luar negeri	-	-	-	-	-	-
5.6 5990 Konstruksi - lainnya	204	95,616	73,960	7.52	4,553	0.46
6 Perdag./Hotel/Rest	3,601	237,146	181,726	18.47	9,502	0.97
6.1 6300 Pembelian dan pengumpulan barang dagangan dalam negeri	768	6,760	5,507	0.56	206	0.02
6.2 6400 Distribusi	57	34,017	19,586	1.99	807	0.08
6.3 6500 Perdagangan eceran	2,512	127,356	99,038	10.07	6,055	0.62
6.4 6600 Restoran dan hotel	16	6,676	5,968	0.61	1,033	0.10
6.5 6900 Perdagangan, restoran dan hotel lainnya	248	62,337	51,627	5.25	1,401	0.14
7 Pengangkutan dll	137	14,268	11,882	1.21	1,210	0.12
7.1 7100 Pengangkutan umum	135	13,703	11,755	1.19	1,210	0.12
7.2 7200 Biro Perjalanan	2	565	127	0.01	-	-
7.3 7300 Pergudangan	-	-	-	-	-	-
7.4 7400 Komunikasi	-	-	-	-	-	-
8 Jasa Dunia Usaha	105	14,250	8,538	0.87	1,046	0.11
8.1 8100 Real estate - Perumahan sederhana	1	1,000	250	0.03	-	-
8.2 8120 Real estate - Pasar inpres	-	-	-	-	-	-
8.3 8190 Real estate - Lainnya	1	450	450	0.05	-	-
8.4 8900 Jasa-jasa dunia usaha lainnya	103	12,800	7,838	0.80	1,046	0.11

**KREDIT BANK UMUM MENURUT SEKTOR EKONOMI
DAN SKALA USAHA
PROVINSI M A L U K U
POSISI SEPTEMBER 2006
(SUMBER : DATA LBU BI AMBON)**

JUTA RUPIAH

SEKTOR EKONOMI	KREDIT MIKRO (PLAFOND < 50 JT)					
	REKENING	PLAFOND	BAKI DEBET		NPL	
			NOMINAL	%	NOMINAL	%
TOTAL	48,483	598,813	568,169	57.75	16,109	1.64
1 Pertanian	28	399	314	0.06	32	0.01
1.1 1110 Pertanian - Tanaman Pangan	19	241	228	0.04	32	0.01
1.2 1140 Pertanian - Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	-	-
1.3 1160 Pertanian - Perikanan	4	34	12	0.00	-	-
1.4 1170 Pertanian - Peternakan	1	50	-	-	-	-
1.5 1180 Kehutanan dan pematongan kayu (logging)	-	-	-	-	-	-
1.6 1200 Perburuan	-	-	-	-	-	-
1.7 1310 Sarana Pertanian	-	-	-	-	-	-
1.8 1390 Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian-Lainnya	4	74	74	0.01	-	-
2 Pertambangan	-	-	-	-	-	-
2.1 2100 Pertambangan - Minyak dan Gas bumi	-	-	-	-	-	-
2.2 2200 Pertambangan -. Biji logam	-	-	-	-	-	-
2.3 2300 Pertambangan - Batubara	-	-	-	-	-	-
2.4 2900 Pertambangan - Lainnya	-	-	-	-	-	-
3 Industri	19	340	340	0.03	47	0.00
3.1 3100 Industri makanan, minuman, dan tembakau	-	-	-	-	-	-
3.2 3200 Industri makanan ternak dan ikan	-	-	-	-	-	-
3.3 3300 Industri tekstil, sandang, dan kulit	-	-	-	-	-	-
3.4 3400 Industri kayu dan hasil-hasil kayu	-	-	-	-	-	-
3.5 3500 Industri bahan kertas(pulp), kertas, dan hasil-hasil kertas, percetakan dan penerbitan	-	-	-	-	-	-
3.6 3600 Industri pengolahan bahan kimia dan hasil kimia, minyak bumi, batubara, karet, dan plastik	-	-	-	-	-	-
3.7 3700 Industri pengolahan hasil tambang bukan logam, selain hasil minyak bumi, dan batubara	1	50	50	0.01	-	-
3.8 3990 Industri pengolahan lainnya	18	290	290	0.05	47	0.01
4 Listrik, Gas & Air	-	-	-	-	-	-
4.1 4100 Listrik	-	-	-	-	-	-
4.2 4200 Gas	-	-	-	-	-	-
4.3 4300 Air	-	-	-	-	-	-
5 Konstruksi	15	567	554	0.06	118	0.01
5.1 5100 Perumahan sederhana	2	28	33	0.01	-	-
5.2 5300 Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT)	-	-	-	-	-	-
5.3 5500 Jalan raya dan jembatan	5	173	173	0.03	70	0.01
5.4 5800 Listrik	-	-	-	-	-	-
5.5 5900 Proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari/untuk pembayaran di luar negeri	-	-	-	-	-	-
5.6 5990 Konstruksi - lainnya	8	366	348	0.06	48	0.01
6 Perdag./Hotel/Rest	2,962	20,187	19,149	1.95	3,564	0.36
6.1 6300 Pembelian dan pengumpulan barang dagangan dalam negeri	760	3,505	3,475	0.61	206	0.04
6.2 6400 Distribusi	3	106	105	0.02	-	-
6.3 6500 Perdagangan eceran	2,167	15,314	14,135	2.49	3,308	0.58
6.4 6600 Restoran dan hotel	2	100	97	0.02	-	-
6.5 6900 Perdagangan, restoran dan hotel lainnya	30	1,162	1,337	0.24	50	0.01
7 Pengangkutan dll	86	1,651	1,332	0.14	107	0.01
7.1 7100 Pengangkutan umum	86	1,651	1,332	0.23	107	0.02
7.2 7200 Biro Perjalanan	-	-	-	-	-	-
7.3 7300 Pergudangan	-	-	-	-	-	-
7.4 7400 Komunikasi	-	-	-	-	-	-
8 Jasa Dunia Usaha	76	999	849	0.09	46	0.00
8.1 8100 Real estate - Perumahan sederhana	-	-	-	-	-	-
8.2 8120 Real estate - Pasar inpres	-	-	-	-	-	-
8.3 8190 Real estate - Lainnya	-	-	-	-	-	-
8.4 8900 Jasa-jasa dunia usaha lainnya	76	999	849	0.15	46	0.01

**KREDIT BANK UMUM MENURUT SEKTOR EKONOMI
DAN SKALA USAHA
PROVINSI M A L U K U
POSISI SEPTEMBER 2006
(SUMBER : DATA LBU BI AMBON)**

JUTA RUPIAH

SEKTOR EKONOMI	KREDIT USAHA KECIL (PLAFOND 50 JT - 500 JT)					
	REKENING	PLAFOND	BAKI DEBET		NPL	
			NOMINAL	%	NOMINAL	%
TOTAL	1,784	253,460	210,478	21.39	7,822	0.80
1 Pertanian	12	3,223	2,459	1.17	-	-
1.1 1110 Pertanian - Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-
1.2 1140 Pertanian - Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	-	-
1.3 1160 Pertanian - Perikanan	6	1,790	1,275	0.61	-	-
1.4 1170 Pertanian - Peternakan	3	953	881	0.42	-	-
1.5 1180 Kehutanan dan pemotongan kayu (logging)	-	-	-	-	-	-
1.6 1200 Perburuan	-	-	-	-	-	-
1.7 1310 Sarana Pertanian	1	300	230	0.11	-	-
1.8 1390 Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian-Lainnya	2	180	73	0.03	-	-
2 Pertambangan	-	-	-	-	-	-
2.1 2100 Pertambangan - Minyak dan Gas bumi	-	-	-	-	-	-
2.2 2200 Pertambangan -. Biji logam	-	-	-	-	-	-
2.3 2300 Pertambangan - Batubara	-	-	-	-	-	-
2.4 2900 Pertambangan - Lainnya	-	-	-	-	-	-
3 Industri	4	965	864	0.09	-	-
3.1 3100 Industri makanan, minuman, dan tembakau	1	205	205	0.10	-	-
3.2 3200 Industri makanan ternak dan ikan	-	-	-	-	-	-
3.3 3300 Industri tekstil, sandang, dan kulit	-	-	-	-	-	-
3.4 3400 Industri kayu dan hasil-hasil kayu	-	-	-	-	-	-
3.5 3500 Industri bahan kertas(pulp), kertas, dan hasil-hasil kertas, percetakan dan penerbitan	-	-	-	-	-	-
3.6 3600 Industri pengolahan bahan kimia dan hasil kimia, minyak bumi, batubara, karet, dan plastik	-	-	-	-	-	-
3.7 3700 Industri pengolahan hasil tambang bukan logam, selain hasil minyak bumi, dan batubara	1	500	488	0.23	-	-
3.8 3990 Industri pengolahan lainnya	2	260	171	0.08	-	-
4 Listrik, Gas & Air	-	-	-	-	-	-
4.1 4100 Listrik	-	-	-	-	-	-
4.2 4200 Gas	-	-	-	-	-	-
4.3 4300 Air	-	-	-	-	-	-
5 Konstruksi	178	34,181	29,665	3.02	2,983	0.30
5.1 5100 Perumahan sederhana	3	1,184	892	0.42	-	-
5.2 5300 Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT)	-	-	-	-	-	-
5.3 5500 Jalan raya dan jembatan	22	3,631	3,487	1.66	1,386	0.66
5.4 5800 Listrik	-	-	-	-	-	-
5.5 5900 Proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari/untuk pembayaran di luar negeri	-	-	-	-	-	-
5.6 5990 Konstruksi - lainnya	153	29,366	25,286	12.01	1,597	0.76
6 Perdag./Hotel/Rest	530	96,813	75,579	7.68	1,721	0.17
6.1 6300 Pembelian dan pengumpulan barang dagangan dalam negeri	6	755	648	0.31	-	-
6.2 6400 Distribusi	33	9,681	5,840	2.77	7	0.00
6.3 6500 Perdagangan eceran	294	54,064	41,490	19.71	1,020	0.48
6.4 6600 Restoran dan hotel	9	1,388	1,102	0.52	33	0.02
6.5 6900 Perdagangan, restoran dan hotel lainnya	188	30,925	26,499	12.59	661	0.31
7 Pengangkutan dll	45	5,199	4,068	0.41	1,103	0.11
7.1 7100 Pengangkutan umum	43	4,634	3,941	1.87	1,103	0.52
7.2 7200 Biro Perjalanan	2	565	127	0.06	-	-
7.3 7300 Pergudangan	-	-	-	-	-	-
7.4 7400 Komunikasi	-	-	-	-	-	-
8 Jasa Dunia Usaha	23	4,101	3,333	0.34	-	-
8.1 8100 Real estate - Perumahan sederhana	-	-	-	-	-	-
8.2 8120 Real estate - Pasar inpres	-	-	-	-	-	-
8.3 8190 Real estate - Lainnya	1	450	450	0.21	-	-
8.4 8900 Jasa-jasa dunia usaha lainnya	22	3,651	2,883	1.37	-	-

**KREDIT BANK UMUM MENURUT SEKTOR EKONOMI
DAN SKALA USAHA
PROVINSI M A L U K U
POSISI SEPTEMBER 2006
(SUMBER : DATA LBU BI AMBON)**

JUTA RUPIAH

SEKTOR EKONOMI	KREDIT USAHA MENENGAH (PLAFOND 500 JT - 5 MILYAR)					
	REKENING	PLAFOND	BAKI DEBET		NPL	
			NOMINAL	%	NOMINAL	%
TOTAL	204	247,827	183,087	18.61	10,262	1.04
1 Pertanian	4	5,678	4,888	2.67	-	-
1.1 1110 Pertanian - Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-
1.2 1140 Pertanian - Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	-	-
1.3 1160 Pertanian - Perikanan	4	5,678	4,888	2.67	-	-
1.4 1170 Pertanian - Peternakan	-	-	-	-	-	-
1.5 1180 Kehutanan dan pemotongan kayu (logging)	-	-	-	-	-	-
1.6 1200 Perburuan	-	-	-	-	-	-
1.7 1310 Sarana Pertanian	-	-	-	-	-	-
1.8 1390 Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian-Lainnya	-	-	-	-	-	-
2 Pertambangan	-	-	-	-	-	-
2.1 2100 Pertambangan - Minyak dan Gas bumi	-	-	-	-	-	-
2.2 2200 Pertambangan - Biji logam	-	-	-	-	-	-
2.3 2300 Pertambangan - Batubara	-	-	-	-	-	-
2.4 2900 Pertambangan - Lainnya	-	-	-	-	-	-
3 Industri	1	1,000	971	0.10	-	-
3.1 3100 Industri makanan, minuman, dan tembakau	-	-	-	-	-	-
3.2 3200 Industri makanan ternak dan ikan	-	-	-	-	-	-
3.3 3300 Industri tekstil, sandang, dan kulit	-	-	-	-	-	-
3.4 3400 Industri kayu dan hasil-hasil kayu	-	-	-	-	-	-
3.5 3500 Industri bahan kertas(pulp), kertas, dan hasil-hasil kertas, percetakan dan penerbitan	-	-	-	-	-	-
3.6 3600 Industri pengolahan bahan kimia dan hasil kimia, minyak bumi, batubara, karet, dan plastik	-	-	-	-	-	-
3.7 3700 Industri pengolahan hasil tambang bukan logam, selain hasil minyak bumi, dan batubara	-	-	-	-	-	-
3.8 3990 Industri pengolahan lainnya	1	1,000	971	0.53	-	-
4 Listrik, Gas & Air	-	-	-	-	-	-
4.1 4100 Listrik	-	-	-	-	-	-
4.2 4200 Gas	-	-	-	-	-	-
4.3 4300 Air	-	-	-	-	-	-
5 Konstruksi	47	71,364	53,046	5.39	2,908	0.30
5.1 5100 Perumahan sederhana	1	950	190	0.10	-	-
5.2 5300 Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT)	-	-	-	-	-	-
5.3 5500 Jalan raya dan jembatan	3	4,530	4,530	2.47	-	-
5.4 5800 Listrik	-	-	-	-	-	-
5.5 5900 Proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari/untuk pembayaran di luar negeri	-	-	-	-	-	-
5.6 5990 Konstruksi - lainnya	43	65,884	48,326	26.40	2,908	1.59
6 Perdag./Hotel/Rest	109	120,146	86,998	8.84	4,217	0.43
6.1 6300 Pembelian dan pengumpulan barang dagangan dalam negeri	2	2,500	1,384	0.76	-	-
6.2 6400 Distribusi	21	24,230	13,641	7.45	800	0.44
6.3 6500 Perdagangan eceran	51	57,978	43,413	23.71	1,727	0.94
6.4 6600 Restoran dan hotel	5	5,188	4,769	2.60	1,000	0.55
6.5 6900 Perdagangan, restoran dan hotel lainnya	30	30,250	23,791	12.99	690	0.38
7 Pengangkutan dll	6	7,418	6,482	0.66	-	-
7.1 7100 Pengangkutan umum	6	7,418	6,482	3.54	-	-
7.2 7200 Biro Perjalanan	-	-	-	-	-	-
7.3 7300 Pergudangan	-	-	-	-	-	-
7.4 7400 Komunikasi	-	-	-	-	-	-
8 Jasa Dunia Usaha	6	9,150	4,356	0.44	1,000	0.10
8.1 8100 Real estate - Perumahan sederhana	1	1,000	250	0.14	-	-
8.2 8120 Real estate - Pasar inpres	-	-	-	-	-	-
8.3 8190 Real estate - Lainnya	-	-	-	-	-	-
8.4 8900 Jasa-jasa dunia usaha lainnya	5	8,150	4,106	2.24	1,000	0.55

**KREDIT BANK UMUM MENURUT SEKTOR EKONOMI
DAN SKALA USAHA
PROVINSI M A L U K U
POSISI SEPTEMBER 2006
(SUMBER : DATA LBU BI AMBON)**

JUTA RUPIAH

SEKTOR EKONOMI	KREDIT NON UMKM (PLAFOND > 5 MILYAR)					
	REKENING	PLAFOND	BAKI DEBET		NPL	
			NOMINAL	%	NOMINAL	%
TOTAL	3	22,129	22,129	2.25	-	-
1 Pertanian	-	-	-	-	-	-
1.1 1110 Pertanian - Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-
1.2 1140 Pertanian - Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	-	-
1.3 1160 Pertanian - Perikanan	-	-	-	-	-	-
1.4 1170 Pertanian - Peternakan	-	-	-	-	-	-
1.5 1180 Kehutanan dan pemotongan kayu (logging)	-	-	-	-	-	-
1.6 1200 Perburuan	-	-	-	-	-	-
1.7 1310 Sarana Pertanian	-	-	-	-	-	-
1.8 1390 Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian-Lainnya	-	-	-	-	-	-
2 Pertambangan	-	-	-	-	-	-
2.1 2100 Pertambangan - Minyak dan Gas bumi	-	-	-	-	-	-
2.2 2200 Pertambangan -. Biji logam	-	-	-	-	-	-
2.3 2300 Pertambangan - Batubara	-	-	-	-	-	-
2.4 2900 Pertambangan - Lainnya	-	-	-	-	-	-
3 Industri	-	-	-	-	-	-
3.1 3100 Industri makanan, minuman, dan tembakau	-	-	-	-	-	-
3.2 3200 Industri makanan ternak dan ikan	-	-	-	-	-	-
3.3 3300 Industri tekstil, sandang, dan kulit	-	-	-	-	-	-
3.4 3400 Industri kayu dan hasil-hasil kayu	-	-	-	-	-	-
3.5 3500 Industri bahan kertas(pulp), kertas, dan hasil-hasil kertas, percetakan dan penerbitan	-	-	-	-	-	-
3.6 3600 Industri pengolahan bahan kimia dan hasil kimia, minyak bumi, batubara, karet, dan plastik	-	-	-	-	-	-
3.7 3700 Industri pengolahan hasil tambang bukan logam, selain hasil minyak bumi, dan batubara	-	-	-	-	-	-
3.8 3990 Industri pengolahan lainnya	-	-	-	-	-	-
4 Listrik, Gas & Air	-	-	-	-	-	-
4.1 4100 Listrik	-	-	-	-	-	-
4.2 4200 Gas	-	-	-	-	-	-
4.3 4300 Air	-	-	-	-	-	-
5 Konstruksi	-	-	-	-	-	-
5.1 5100 Perumahan sederhana	-	-	-	-	-	-
5.2 5300 Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT)	-	-	-	-	-	-
5.3 5500 Jalan raya dan jembatan	-	-	-	-	-	-
5.4 5800 Listrik	-	-	-	-	-	-
5.5 5900 Proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari/untuk pembayaran di luar negeri	-	-	-	-	-	-
5.6 5990 Konstruksi - lainnya	-	-	-	-	-	-
6 Perdag./Hotel/Rest	-	-	-	-	-	-
6.1 6300 Pembelian dan pengumpulan barang dagangan dalam negeri	-	-	-	-	-	-
6.2 6400 Distribusi	-	-	-	-	-	-
6.3 6500 Perdagangan eceran	-	-	-	-	-	-
6.4 6600 Restoran dan hotel	-	-	-	-	-	-
6.5 6900 Perdagangan, restoran dan hotel lainnya	-	-	-	-	-	-
7 Pengangkutan dll	-	-	-	-	-	-
7.1 7100 Pengangkutan umum	-	-	-	-	-	-
7.2 7200 Biro Perjalanan	-	-	-	-	-	-
7.3 7300 Pergudangan	-	-	-	-	-	-
7.4 7400 Komunikasi	-	-	-	-	-	-
8 Jasa Dunia Usaha	-	-	-	-	-	-
8.1 8100 Real estate - Perumahan sederhana	-	-	-	-	-	-
8.2 8120 Real estate - Pasar inpres	-	-	-	-	-	-
8.3 8190 Real estate - Lainnya	-	-	-	-	-	-
8.4 8900 Jasa-jasa dunia usaha lainnya	-	-	-	-	-	-

**Data Sistem Pembayaran Kantor Bank Indonesia Ambon
(Dalam Juta Rp)**

	2004	2005				2006		
	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III
Jumlah Hari Transaksi	60	59	62	65	56	61	63	63
1. Perputaran Uang Kartal								
a. Inflow (kumulatif)	431,855	401,025	341,692	428,832	477,280	512,664	487,168	591,647
Inflow harian	7,198	6,797	5,511	6,597	8,523	8,404	7,733	9,391
b. Outflow (kumulatif)	673,949	336,300	427,640	633,967	824,363	420,749	633,937	751,978
Outflow harian	11,232	5,700	6,897	9,753	14,721	6,898	10,062	11,936
Net (Outflow - Inflow)	242,094	(64,725)	85,948	205,135	347,084	(91,915)	146,769	160,331
c. Persediaan Kas (Posisi)	247,270	248,000	264,411	255,879	139,572	380,737	296,180	309,658
d. PTTB (kumulatif)	42,714	60,848.93	128,570	96,005	59,026	56,482	124,127	93,979
PTTB Harian	712	1,031	2,074	1,477	1,054	926	1,970	1,492
e. Uang Palsu (kumulatif):	0	0	0	0	0	0	0	50,000
2. Kliring (kumulatif)								
a. Perputaran Kliring								
- Lembar (ribuan)	20.38	18.25	20.23	26.64	27.68	25.85	28.35	24.97
- Nominal (miliar rupiah)	362.89	316.59	325.17	446.59	501.49	440.19	450.29	443.78
b. Rata-rata Harian Perputaran Kliring								
- Lembar (ribuan)	0.34	0.31	0.33	0.41	0.50	0.42	0.45	0.40
- Nominal (miliar rupiah)	6.04	5.37	5.25	6.88	9.00	7.22	7.15	7.04
c. Nisbah Rata-rata Penolakan Cek/BG Kosong								
- Lembar (%)	0.08	0.09	0.10	0.09	0.18	0.22	0.13	0.26
- Nominal (%)	0.26	0.25	0.18	0.20	0.19	0.52	0.35	0.46
3. RTGS (Kumulatif) dalam jutaan								
a. Outgoing	1,433,234	1,794,240	1,971,593	2,267,332	1,716,116	3,106,611	3,448,575	3,914,478
Outgoing harian	23,887	30,411	31,800	34,882	30,645	50,928	54,739	62,135
b. Incoming	1,325,065	1,471,285	1,692,183	1,903,706	1,464,337	2,470,526	3,211,644	5,400,350
Incoming harian	22,084	24,937	27,293	29,288	26,149	40,500	50,978	85,720
c. Net RTGS (Incoming - Outgoing)	(108,169)	(322,955)	(279,409)	(363,626)	(251,779)	(636,085)	(236,931)	1,485,872

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1. ISTILAH BIDANG EKONOMI DAN MONETER

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. PDRB dibedakan menjadi : (1) PDRB atas dasar harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, dan (2) PDRB atas dasar harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar (saat ini digunakan tahun 2000)

Pertumbuhan Ekonomi

adalah perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan)

Inflasi

adalah perubahan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang umumnya inflasi diukur dengan perubahan sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat, seperti tercermin pada perkembangan indeks harga konsumen (IHK).

Inflasi month to month

atau Inflasi Bulanan adalah inflasi yang mengukur perbandingan (nisbah) Indeks Harga Konsumen pada bulan diukur dengan IHK pada bulan sebelumnya, dan sering disingkat (m-t-m)

Inflasi year to date

atau Inflasi Kumulatif adalah inflasi yang mengukur perbandingan (nisbah) Indeks Harga Konsumen pada bulan diukur dengan IHK pada akhir bulan Desember pada tahun sebelumnya, dan sering disingkat (y-t-d)

Inflasi year on year

atau Inflasi Tahunan adalah perbandingan (nisbah) Indeks Harga Konsumen pada bulan diukur dengan IHK pada bulan yang sama tahun sebelumnya, dan sering disingkat (y-o-y)

Inflasi quarter to quarter

atau Inflasi Triwulanan adalah perbandingan (nisbah) Indeks Harga Konsumen pada akhir triwulan yang bersangkutan dengan IHK pada akhir triwulan sebelumnya, dan sering disingkat (q-t-q)

Uang Kartal

adalah uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPKN dan bank umum

Uang Giral

adalah uang yang terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam rupiah pada sistem moneter

Uang Kuasi

adalah uang yang terdiri atas simpanan berjangka dan tabungan penduduk pada bank umum, baik dalam rupiah maupun valuta asing

2. ISTILAH BIDANG PERBANKAN

Kredit

adalah penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan penjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

- (1) pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *note purchase agreement*
- (2) pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang

Kredit Berdasar Lokasi Proyek

adalah penghitungan kredit perbankan yang didasarkan tempat / dimana lokasi proyek kredit tersebut dilaksanakan. *Misalnya* kredit lokasi proyek Maluku adalah seluruh kredit perbankan nasional yang disalurkan dengan lokasi proyek di Maluku baik itu berasal dari perbankan di Maluku maupun oleh perbankan di luar Maluku.

Kredit Berdasar Bank Pelapor

adalah penghitungan kredit perbankan yang didasarkan pada wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebagai pusat pelaporan data. *Misalnya* kredit bank pelapor Maluku adalah seluruh kredit perbankan di Provinsi Maluku yang dilaporkan kepada Bank Indonesia Ambon atau dapat diartikan kredit yang disalurkan oleh perbankan yang ada di Provinsi Maluku saja.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

adalah simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka

Loan to Deposit Ratio (LDR)

merupakan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank, baik dalam rupiah maupun valas

Non Performing Loans (NPLs)

adalah kredit-kredit yang tergolong non-lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif

3. ISTILAH BIDANG SISTEM PEMBAYARAN

Uang Yang Diedarkan (UYD)

adalah uang kartal yang berada dimasyarakat ditambah dengan uang kartal yang berada di kas bank-bank. Atau pengertiannya sama dengan uang kartal di dalam konsep moneter.

Inflow

adalah uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

Outflow

adalah uang yang diedarkan aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia

Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB)

adalah kegiatan pemusnahan uang bagi uang yang sudah tidak layak edar.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

merupakan suatu penyelesaian kewajiban bayar-membayar (settlement) yang dilakukan secara on-line atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana.